

# **RESPON PEMERINTAH MESIR TERHADAP AGRESI**

## **ISRAEL KE JALUR GAZA TAHUN 2014**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh:**

**Meri Puji Astuti**

**1110083000002**



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA**

**2017**

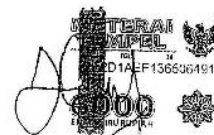
**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Skripsi yang berjudul:

**RESPON PEMERINTAH MESIR TERHADAP AGRESI  
ISRAEL KE JALUR GAZA 2014**

- 1
- 2
- 3
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
  2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
  3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 29 Mei 2017



Mei Puji Astuti

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Meri Puji Astuti  
NIM : 1110083000002  
Program Studi : Hubungan Internasional

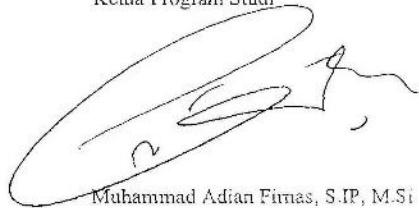
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

RESPON PEMERINTAH MESIR TERHADAP AGRESI ISRAEL KE JALUR  
GAZA TAHUN 2014

dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

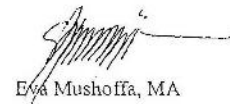
Ciputat, 29 Mei 2017

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Muhammad Adian Firmas, S.IP, M.Si

Menyetujui,  
Pembimbing



Eva Mushoffa, MA

**PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI**

**RESPON PEMERINTAH MESIR TERHADAP AGRESI ISRAEL  
KE JALUR GAZA TAHUN 2014**

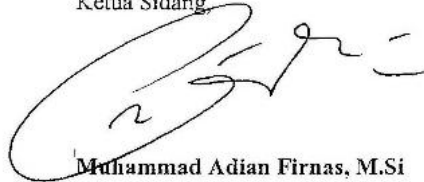
oleh

**Meri Puji Astuti**

**1110083000002**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 13 Juli 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.

Ketua Sidang,



**Muhammad Adian Firnas, M.Si**

Sekretaris Sidang,



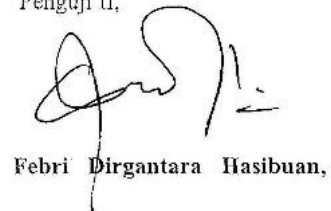
**Eva Mushoffa, MA**

Penguji I,



**Ingrid Galuh Mustikawati, MHSPS  
M.M**

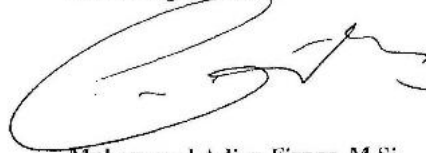
Penguji II,



**Febri Dirgantara Hasibuan,**

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada 13 Juli 2017.

Ketua Program Studi,



**Muhammad Adian Firnas, M.Si**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang respon pemerintah Mesir terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza pada tahun 2014. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran yang melihat pada kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, faktor internal dan eksternal yaitu aliansi, kepentingan ekonomi, dan keamanan. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka. Dari hasil penelitian skripsi ini melihat bahwa pada tahun 2014, Israel melancarkan agresi militer ke Jalur Gaza selama 51 hari. Mesir sebagai negara terdekat dengan Jalur Gaza memblokir pintu Rafah dan membukanya hanya untuk korban luka dan bantuan logistik saja.

Jalur Gaza diduduki Israel sejak tahun 1967 setelah memenangkan Perang Enam Hari. Setelah perang tersebut, Israel muncul sebagai kekuatan militer yang dominan di kawasan. Pada tahun 2005, Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza dan mengosongkan pemukiman Yahudi di Jalur Gaza. Setelah Hamas memenangkan pemilu legislatif di Gaza, Mesir menganggap Hamas menjadi ancaman bagi keamanan negaranya. Israel dan Mesir sepakat untuk memblokir Jalur Gaza melalui pintu Rafah pada tahun 2007. Pada tahun 2008 dan 2012, Israel melancarkan agresi militer ke Jalur Gaza. Kemudian pada tahun 2014, Israel kembali melancarkan agresi militer ke Jalur Gaza.

Sejak Mesir menandatangani Perjanjian Damai dengan Israel, keduanya mempunyai hubungan bilateral yang baik. Respon Mesir pada agresi tersebut dipengaruhi oleh hubungan keduanya. Mesir dan Israel mempunyai kerjasama strategis, kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama keamanan di perbatasan Mesir-Israel. Respon ini dibuat untuk dapat menjaga kepentingan nasional Mesir dan menjaga keamanan nasional Mesir. Pemerintah Mesir bekerjasama dengan Israel untuk dapat mengamankan situasi di Sinai dan perbatasan Rafah yang diduduki oleh kelompok teroris yang kerap melakukan teror kepada penjaga keamanan Mesir di perbatasan dan serangan-serangan terorisme di kawasan tersebut.

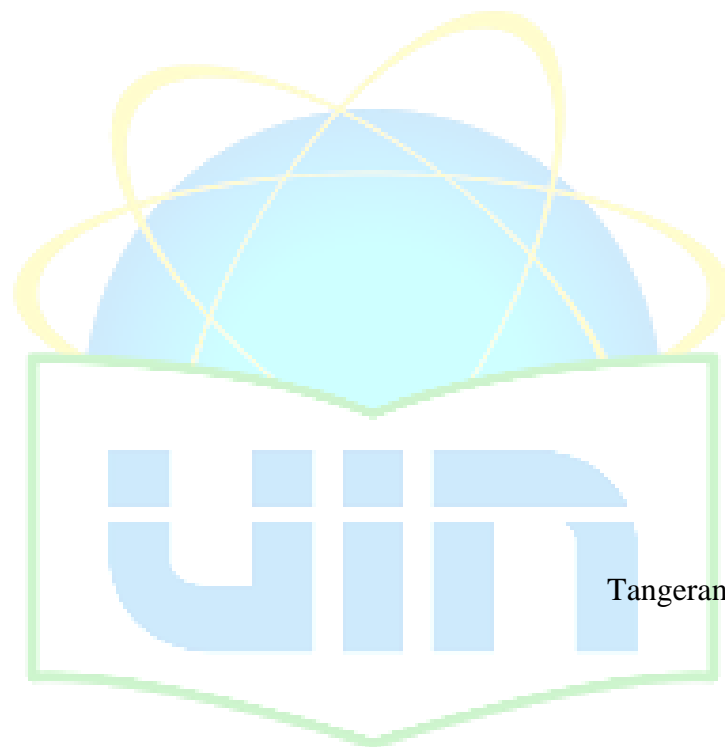
Kata Kunci: Mesir, Israel, Jalur Gaza, Rafah, keamanan

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat berjuang hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Mulyono dan Ibu Siti Asiah yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis serta tidak pernah lelah memberikan semangat dan doa agar peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Penulis juga ingin berterima kasih kepada kakak-kakak kandung penulis serta kakak ipar atas dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Adian Firnas, M.Si sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Eva Mushoffa, MA sebagai Sekertaris Jurusan Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang tanpa henti memberikan saran, kritikan, arahan, kesabaran, dan ilmunya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional atas ilmu yang diberikan selama penulis duduk di bangku kuliah dan bantuan dalam urusan administrasi selama masa kuliah.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama masa kuliah yaitu Nuning Sintya Defa, Ardhiana Fitriyanie, Clara Safitri, Gina Nurbaiti, Anggi Febrianto, Nabila Fatma Giyanti, Syafiq Muhammad, Muhammad Yoga Adi, Ramadhani Eko Putranto. Empat tahun menjalani masa perkuliahan dengan kalian menjadi pengalaman yang luar biasa penuh suka dan duka.
7. Teman-teman terbaik penulis selama SMA yaitu Annisa Nca, Indri, Imam, Giri, Gilang, Gunawan, Try yang telah memberikan semangat serta dorongan moril agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman HI A 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Keluarga Besar International Studies Club (ISC) yang membuat penulis mendapatkan pengalaman nasional dan internasional yaitu Andre, Fahmi, Bayu, Fikri, Kak Andri, Kak Amar, Kak Adit, Acit, Desica, Abib, Aptiani, Mahar, Tara, Annisa, dan anggota ISC lainnya.
10. Semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih semuanya.



Tangerang, 9 Juli 2017

**Meri Puji Astuti**

## DAFTAR SINGKATAN

FPDM	: Foreign Policy Decision Making
GNB	: Gerakan Non Blok
HAM	: Hak Asasi Manusia
KAA	: Konferensi Asia-Afrika
LA	: Liga Arab
MEMO	: Middle East Monitor
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
OPA	: Organisasi Persatuan Afrika
OPE	: Operation Protective Edge
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PLO	: Palestine Liberation Organization
UA	: Uni Afrika
UNOCHA	: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNRWA	: United Nations Relief and Works Agency



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Statistik Pemukiman Yahudi Israel di Wilayah Pendudukan tahun 1972-2008	25
Gambar IV.1	.....Bantuan Militer Amerika Serikat ke Mesir tahun 2011-2017	62



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Pernyataan Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
1. Kepentingan Nasional .....	10
2. Kebijakan Luar Negeri .....	12
3. Faktor Domestik dan Faktor Eksternal .....	14
a. Aliansi .....	15
b. Kepentingan Ekonomi .....	16
c. Keamanan .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II AGRESI ISRAEL KE JALUR GAZA TAHUN 2014 .....</b>	<b>22</b>
A. Sejarah Konflik Israel dan Palestina Tahun .....	22
B. Agresi Israel ke Jalur Gaza Palestina Tahun 2014.....	26
C. Dampak Agresi Israel Terhadap Jalur Gaza Tahun 2014 .....	30
<b>BAB III POLITIK LUAR NEGERI MESIR .....</b>	<b>41</b>
A. Orientasi Politik Luar Negeri Mesir .....	41
B. Hubungan Mesir dengan Israel dan Amerika Serikat.....	51
C. Politik Luar Negeri Mesir Masa Kepemimpinan A1 Sisi .....	52
<b>BAB IV ANALISA RESPON PEMERINTAH MESIR TERHADAP AGRESI ISRAEL KE JALUR GAZA TAHUN 2014.....</b>	<b>55</b>
A. Respon Pemerintah Mesir terhadap Agresi Israel ke Jalur Gaza Tahun 2014.....	55
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Respon Pemerintah Mesir terhadap Agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014.....	60
1. Aliansi.....	60
2. Kepentingan Ekonomi.....	64
3. Keamanan.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Kelemahan .....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pernyataan Masalah

Skripsi ini membahas tentang respon Mesir terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014 serta faktor-faktor yang melatarbelakangi respon tersebut. Gaza diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 setelah memenangkan perang Arab-Israel. Israel yang didukung Amerika Serikat mengalahkan 3 negara Arab yaitu Mesir, Suriah, dan Yordania dalam waktu 6 hari. Israel akhirnya menguasai Semenanjung Sinai dan Gaza dari Mesir, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, dan Tepi Barat serta Yerusalem Timur dari Yordania.<sup>1</sup>

Setelah Perang 6 hari, Israel muncul sebagai kekuatan militer yang dominan di kawasan. Hal tersebut menurunkan pamor kekuatan bangsa Arab. Israel mulai membangun pemukiman Yahudi di Gaza, Semenanjung Sinai, dan Tepi Barat. Selain itu, Israel juga mendirikan daerah administrasi militer yang memerintah penduduk Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Gaza. Penduduk Palestina tidak mendapatkan haknya dalam hal politik dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berekspresi dan pers.<sup>2</sup>

Pada September 1978, Presiden Jimmy Carter mengundang Anwar Sadat dan Menachem Begin ke perundingan yang dinamakan Camp David. Perundingan ini terdapat dua kesepakatan yaitu perdamaian antara Mesir dan Israel dan konsep untuk resolusi dari krisis Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina. Namun, hanya poin pertama dari perjanjian Camp David saja yang berjalan.

---

<sup>1</sup> Reza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Mizan: Jakarta, 2007), 318-319

<sup>2</sup> Joel Beinin dan Lisa Hajar, *Palestine, Israel, and the Arab-Israeli Conflict*, The Middle East Research and Information Project (MERIP), Februari 2014, 9

Sedangkan resolusi untuk konflik Palestina tidak dapat disetujui oleh negara-negara Arab. Hal ini ditunjukkan dengan Israel tetap melakukan pembangunan pemukiman di wilayah Tepi Barat dan Gaza.<sup>3</sup>

Pada Desember 1987, penduduk Palestina di Tepi Barat dan Gaza memulai pemberontakan terhadap pendudukan Israel yang disebut dengan *intifada*. Pemberontakan ini berupa demonstrasi besar-besaran, mogok masal, menolak membayar pajak, memboikot produk-produk Israel, dan juga disertai dengan lempar-lemparan batu dan bom molotov. Israel melawan pemberontakan tersebut dengan cara militer sehingga banyak dari penduduk Palestina tewas. Pada tahun 1990, pemimpin pemberontakan berhasil ditangkap dan para demonstran kehilangan kekompakannya.<sup>4</sup>

Pada tahun 1993, Israel dan *Palestine Liberation Operation* (PLO) menandatangani perjanjian di Washington yaitu Oslo Accord. Perjanjian tersebut menghasilkan beberapa prinsip deklarasi yang mengakui kedaulatan keduanya. Namun pada akhirnya perjanjian ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Sedikitnya terdapat beberapa faktor yang membuat perdamaian antara kedua pihak sulit untuk diwujudkan.<sup>5</sup> Pertama, beberapa kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak belum menemukan suatu resolusi yang berkelanjutan terutama dalam implementasi dari resolusi tersebut. Seringkali perjanjian gencatan senjata antara kedua pihak masih sering dilanggar. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya beberapa kali konflik dan baku tembak antara warga sipil maupun militer kedua belah pihak yang terjadi sejak tahun 2005 sampai 2016.

---

<sup>3</sup> Joel Beinin dan Lisa Hajar, *Palestine, Israel, and the Arab-Israeli Conflict*, 9

<sup>4</sup> Joel Beinin dan Lisa Hajar, *Palestine, Israel, and the Arab-Israeli Conflict*, 9

<sup>5</sup> Reza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, 318-319

Kedua, tidak adanya mediator konflik yang dengan sungguh bersedia untuk menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas. Dalam hal ini Amerika Serikat yang telah beberapa kali berperan sebagai mediator dapat dikatakan kurang serius untuk menengahi konflik yang melibatkan Israel dan Palestina. Ketiga, berkuasanya Partai Likud di pemerintahan Israel. Dalam sejarah pencapaian resolusi konflik kedua belah pihak, jika Israel dikuasai oleh partai Likud, maka sangatlah sulit untuk mencapai sebuah perdamaian, karena partai Likud sendiri adalah partai yang terkenal dengan penolakannya terhadap berdirinya negara Palestina.<sup>6</sup>

Pada tahun 2005, Israel menarik pasukannya serta pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza. Setahun kemudian kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza setelah memenangkan pemilu di Palestina. Khawatir dengan pengaruh Hamas yang semakin menguat, Israel melancarkan serangan *Operation Cast Lead* dan *Operation Pillar of Defence* berturut-turut tahun 2008 dan 2012. Israel beralasan Hamas kerap meluncurkan roket ke wilayah mereka.

Sejak Juni 2014, ketegangan kembali terjadi antara Israel dan Palestina. Tiga orang remaja Israel diculik pada 12 Juni 2014 dan dinyatakan hilang. Pada tanggal 30 Juni 2014, tubuh ketiga remaja tersebut ditemukan dalam keadaan terbunuh. Israel menuduh bahwa Hamas berada di belakang penculikan dan pembunuhan ketiga remaja Israel tersebut. Namun Hamas menyangkal hal tersebut.

---

<sup>6</sup> Reza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, 318-319

Serangan Israel ke Jalur Gaza 2014 terjadi selama 50 hari dimulai dari tanggal 8 Juli 2014 hingga 26 Agustus 2014. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut adalah untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan-serangan roket yang diluncurkan dari Jalur Gaza oleh Hamas. Selama tiga hari serangan, ratusan target telah dihancurkan oleh militer Israel berupa peluncur roket, markas teroris militer, dan terowongan-terowongan yang digunakan untuk penyelundupan senjata oleh teroris di Jalur Gaza. Serangan Israel atas wilayah Gaza pada tahun 2014 ini dinamakan *Operation Protective Edge (OPE)*. OPE terbagi menjadi tiga tahap.<sup>7</sup>

Sejak Hamas mengambil alih kepemimpinan di Jalur Gaza pada 2007, Israel menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Selain itu, Hamas juga mempunyai kedekatan dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang merupakan organisasi terlarang dan ilegal. Pada saat Mesir dikuasai oleh Presiden Morsi, Hamas dan Ikhwanul Muslimin menjadi sangat dekat dan keduanya membangun kerjasama di bidang ekonomi dan pembukaan pintu perbatasan Rafah.

Namun sejak Al Sisi menjadi presiden, Mesir dan Israel mengawasi dengan ketat gerakan Hamas di perbatasan Jalur Gaza. Ketika terjadi agresi tersebut, Mesir yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza melalui pintu Rafah justru memblokade Jalur Gaza pada saat serangan berlangsung. Pemerintah Mesir di bawah Presiden Al Sisi mengeluarkan kebijakan menutup pintu perbatasan

---

<sup>7</sup> Eitan Shamir, *The 2014 Gaza War: Rethinking Operation Protective Edge*, (Middle East Quarterly, Spring 2015), 2

Rafah dan ikut memblokade Jalur Gaza.<sup>8</sup> Pintu ini dibuka hanya untuk mengeluarkan korban yang terluka dari serangan Israel tersebut dan sedikit distribusi logistik.

Sikap pemerintah Mesir ini memunculkan pertanyaan dan protes dari dunia internasional. Negara-negara Liga Arab dan negara mayoritas muslim mendesak Mesir untuk membuka pintu perbatasan Rafah. Selain itu negara-negara Uni Eropa juga mendesak Mesir untuk menghentikan blokade terhadap Jalur Gaza. Bahkan rakyat Mesir sendiri pun mendesak dan menuntut pemerintahnya memutus hubungan dengan Israel. Namun pemerintah Mesir tetap pada keputusannya untuk memblokade Gaza melalui pintu Rafah.<sup>9</sup>

Mesir merupakan salah satu negara yang bergabung dalam Liga Arab. Perannya dalam skala regional sangat diperhitungkan sejak berdirinya organisasi tersebut. Melalui keanggotaannya dalam organisasi tersebut Mesir diharapkan membantu Palestina dengan membuka pintu Rafah pada saat terjadi agresi Israel. Namun, pada saat terjadi operasi militer Israel ke Jalur Gaza, Mesir ikut memblokade Gaza dan penduduk di dalamnya. Selain itu, Mesir juga bertindak lebih menguntungkan Israel daripada Palestina. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengambil topik ini sebagai penelitian.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

---

<sup>8</sup>Egypt Independent, Update: Egypt Closes Rafah Crossing, <http://www.egyptindependent.com/news/update-egypt-closes-rafah-crossing>, (diakses 1 September 2016)

<sup>9</sup> Global Research, Third day of Israeli Attacks Deepens Anger of Arab Masses, <http://www.globalresearch.ca/third-day-of-israeli-attacks-deepens-anger-of-arab-masses/11537> (diakses 3 September 2016)



Dari penjelasan di latar belakang, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji respon pemerintah Mesir terhadap agresi militer ke Jalur Gaza tahun 2014. Untuk itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut: *“Mengapa pemerintahan Al Sisi mengeluarkan respon yang lebih menguntungkan Israel pada agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014?”*

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul Respon Pemerintah Mesir terhadap Agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai latar belakang terjadinya serangan militer Israel ke jalur Gaza tahun 2014.
2. Mendeskripsikan respon Pemerintah Mesir terhadap Konflik Israel-Palestina.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi blokade Pemerintah Mesir terhadap Agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014 dan
4. Menganalisa politik luar negeri pada masa Pemerintahan Al Sisi atas blokade di Jalur Gaza.

Sedangkan, Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu terkait dan menjadi salah satu literatur dalam hubungan internasional baik di lingkup universitas maupun lingkup nasional dan internasional
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang membahas mengenai kebijakan luar negeri Mesir

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan maupun masyarakat umum dalam memperdalam wawasan dunia internasional khususnya terkait isu konflik Israel dan Palestina pada Agresi di Jalur Gaza.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam kajian Hubungan Internasional di wilayah Timur Tengah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang hampir serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Khairul Basyar dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2009. Skripsi ini berjudul “Penyerangan Israel terhadap Palestina Ditinjau dari Perspektif Kejahatan Kemanusiaan dalam Kerangka Hukum Internasional”. Skripsi ini menjelaskan penyerangan Israel ke Jalur Gaza jika dilihat dari perspektif kejahatan kemanusiaan menggunakan Hukum Humaniter, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Statuta Roma.

Khairul menjelaskan di dalamnya mengenai sejarah konflik Israel dan Palestina. Selain itu juga mengkaji konflik Israel dan Palestina dalam bidang sosial, politik, dan teologis. Penulis juga membahas seberapa jauh peranan Amerika Serikat dalam konflik Israel dan Palestina. Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel. Penulis membahas pula tentang pandangan masyarakat internasional terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Khairul juga menjelaskan mengenai konflik Israel dan Palestina dan pandangan penyerangan Israel terhadap Palestina ditinjau dari perspektif

kejahatan kemanusiaan dalam kerangka hukum internasional. Skripsi ini mengacu pada Pasal 7 Statuta Roma bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangannya terhadap Palestina.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian dalam skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai penyerangan yang dilancarkan Israel ke Jalur Gaza Palestina pada tahun 2008. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian dari skripsi ini. Pertama terletak pada fokus pembahasan dimana dalam skripsi ini penulis membahas mengenai respon Mesir terhadap penyerangan Israel ke Palestina, sedangkan Khairul Basyar membahas mengenai penyerangan Israel terhadap Palestina dilihat dari perspektif kejahatan kemanusiaan dalam hukum internasional. Selain itu penulis lebih mengembangkan fokusnya melalui Pasal 7 Statuta Roma dalam memandang kasus penyerangan Israel ke Palestina.

Selanjutnya adalah skripsi dari EM Siadari mahasiswa Fakultas Komunikasi USU yang ditulis tahun 2010. Skripsi tersebut berjudul “Pemberitaan Agresi Israel ke Jalur Gaza dalam Surat Kabar Harian Kompas”. Penelitian ini mencoba menjelaskan arah pemberitaan Agresi Israel ke Jalur Gaza yang diterbitkan oleh SKH Kompas. Pemberitaan mengenai Agresi Israel tahun 2008 ke Jalur Gaza banyak memenuhi kolom berita internasional maupun nasional. EM Siadari ingin melihat seberapa seimbang media tersebut dalam menyajikan pemberitaan kepada masyarakat.

Siadari juga menjelaskan mengenai peran media dalam penyerangan tersebut dan dampaknya bagi pola pikir masyarakat mengenai penyerangan

tersebut. Ia melihat bahwa dalam pemberitaan penyerangan Israel ke Jalur Gaza, media lebih berpihak kepada Palestina dan hal ini telah membentuk pola pikir masyarakat terhadap Israel dan menimbulkan opini-opini masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Namun, jika penulis melihat dari aspek pengambilan kebijakan luar negeri atas dasar kepentingan nasional, maka EM Siadari lebih berfokus mengambil pandangan dari aspek media yang mengabarkan konflik tersebut. Selain itu, karena EM Siadari berasal dari Fakultas Komunikasi maka teori-teori yang digunakan lebih kepada teori yang terdapat dalam kajian Ilmu Komunikasi, sedangkan penulis menggunakan konsep hubungan internasional.

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Terry Newman pada tahun 2010 yang berjudul "*Egypt in The Twilight of Mubarak Era*" yang dimuat dalam *Israel Journal of Foreign Affairs Vol. IV No. 3* tahun 2010. Artikel ini membahas tentang stabilitas pemerintahan Mesir di bawah pemerintahan Hosni Mubarak. Selain itu dalam artikel jurnal ini, Newman juga menjabarkan tentang kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh Presiden Mubarak. Dimulai dari masa keemasan ekonomi Mesir melalui liberalisme ekonominya yang meningkatkan investor asing serta pertumbuhan ekonomi 4.7% tahun 2009.

Kemudian Newman membahas tentang adanya perseteruan antara Mubarak dengan Ikwanul Muslimin yang dianggapnya sebagai teroris, sama halnya dengan Hamas di Palestina. Selain itu, penulis juga membahas mengenai

hubungan baik Mesir-Israel selama masa Mubarak yang dianggap beberapa negara muslim Arab lainnya sebagai sebuah pengkhianatan hingga terjadinya penyerangan Israel ke Jalur Gaza tahun 2008.

Persamaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai pemerintah Mesir dan hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin. Selain itu juga sama-sama membahas mengenai hubungan antara Mesir, Israel, dan Palestina. Perbedaan penelitian penulis dengan artikel jurnal tersebut yaitu Newman membahas tentang stabilitas pemerintahan Mesir di bawah Hosni Mubarak. Selain itu juga melihat dari masa keemasan Mesir di bawah kepemimpinan Mubarak.

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mendeskripsikan isu yang diangkat, maka diperlukan kerangka pemikiran yang dapat mendukung argumentasi. Beberapa konsep yang terkait dengan teori realisme yaitu:

##### **1. Kepentingan Nasional**

Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan minimum suatu negara bangsa untuk melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara bangsa lain. Menurut Morgenthau, dari tujuan-tujuan umum tersebut para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijakan-kebijakan spesifik terhadap negara lain, baik yang

bersifat kerjasama maupun konflik.<sup>10</sup> Kepentingan nasional memegang peranan yang besar dalam membentuk kebijakan suatu negara. Kepentingan nasional akan selalu diperjuangkan negara. Kepentingan nasional akan menentukan sikap yang diambil oleh negara nantinya yang berupa kebijakan.<sup>11</sup>

George Kennan dalam buku "*Realities of American Foreign Policy*" yang dirangkum dalam buku *Theories of International Relations* mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah masalah keharusan yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun dan karenanya subjeknya diklasifikasi apakah dipandang baik atau buruk. Jika kepentingan nasional bagi suatu negara merupakan hal yang baik bahkan baik sekali, maka tidak ada alasan untuk melihatnya sebagai standar menilai perilaku politik internasional.<sup>12</sup>

Menurut Plano dan Olton, kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Selain itu, kepentingan nasional tersebut mengacu pada mempertahankan diri sendiri, keamanan, kesejahteraan nasional, perlindungan dan kemajuan teknologi, dan kekuasaan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, kepentingan nasional akan dipakai sebagai salah satu alat untuk mengetahui alasan atas kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara.

## **2. Kebijakan Luar Negeri**

---

<sup>10</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Knopf, 1960)

<sup>11</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1994)

<sup>12</sup> George Kennan, "*Realities of American Foreign Policy*", dalam Scott Burchill, *Theories of International Relations*, (Princeton, 1954), h. 50.

<sup>13</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, (Bandung: Abardin, 1999)

Joseph Frankel mengatakan bahwa jika kebijakan luar negeri adalah konsekuensi dari hasil yang diinginkan dari sang otoritas (*policy makers*) maka kepentingan nasional adalah hasil yang diinginkan tersebut.<sup>14</sup> Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya dan juga untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>15</sup> Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.<sup>16</sup>

Plano dan Olton berpendapat bahwa tujuan kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaukannya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan atau mempertahankan kebijakan perihal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.<sup>17</sup>

Menurut Holsti, tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa

---

<sup>14</sup> Frankel, J, *National Interest*, (London: MacMillan, 1970)

<sup>15</sup> James N. Rosenau, *The Study of World Politics*, (New York: Routledge, 2006)

<sup>16</sup> Rosenau, J.N, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, (New York: The Free Press, 1969)

<sup>17</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*

yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut.<sup>18</sup>

Tujuan kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijakan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Setiap negara mempunyai peluang untuk melakukan diplomasi dengan negara lain, namun *power* setiap negara berbeda sehingga menjadi tidak seimbang.<sup>19</sup>

### **3. Faktor Domestik dan Faktor Eksternal**

Alex Mintz dan Karl DeRouen menyebutkan bahwa perumusan kebijakan luar negeri akan mengacu kepada pilihan individu, grup dan koalisi yang memiliki peran aktif dalam mengambil aksi di kancah Internasional.<sup>20</sup> Hal tersebut dilihat sebagai level analisis dalam menilai bagaimana sebuah kebijakan tersebut di keluarkan oleh negara. Perumusan kebijakan luar negeri sebagai aksi dari sebuah negara untuk bermain di kancah Internasional. Melalui perumusan tersebut negara memposisikan diri dalam memandang sistem internasional sebagai arena untuk memperkuat atau mempengaruhi

---

<sup>18</sup> Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, (New Jersey: A Simon and Shuster Company, 1992)

<sup>19</sup> Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*

<sup>20</sup> Alex Mintz and Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, (New York: Cambridge University Press, New York)



negara lain. Karena negara sebagai aktor utama, akan melahirkan pula perbedaan *outcomes* tergantung kepada proses dari pembuatan keputusan tersebut. Sehingga untuk membelah bagaimana proses kebijakan tersebut dibuat, perumusan kebijakan luar negeri harus memiliki 4 komponen penting, yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan keputusan,
2. Menetapkan alternatif-alternatif,
3. Memilih alternatif tersebut,
4. Mengeksekusi alternatif tersebut.

Keempat komponen tersebut sangat penting karena proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh negara bersifat rasional. Sehingga perumusan kebijakan luar negeri tidak hanya dipandang sebagai keputusan mutlak, melainkan adanya aktor lain yang terlibat sebelum keputusan tersebut dikeluarkan.<sup>21</sup> Kedudukan dari kepentingan nasional sebagai pokok sebuah negara sebelum mengeluarkan kebijakan luar negeri sangat mempengaruhi arah dari kebijakan tersebut pula. Karena setiap keputusan harus diperhitungkan kerugian dan keuntungannya dari alternatif-alternatif yang sudah ditetapkan sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, pengaruh kepentingan nasional dan perhitungan tersebut tidak akan terpisahkan. Karena harus melihat kapabilitas dari negara. Sebagai negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri harus rasional dalam menentukan

---

<sup>21</sup> Alex Mintz and Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*

kebijakannya dengan pertimbangan kepentingan nasional dan perhitungan-perhitungan untuk menciptakan alternatif-alternatif pilihan.<sup>22</sup>

#### a. Ideosinkretik

Menurut Mochtar Mas'ood variabel ideosinkretik adalah sebuah citra atau persepsi. Setiap individu memiliki citra yang berbeda-beda. Hal tersebut karena citra bersifat dinamik dan dapat berubah-ubah kapan saja tergantung bagaimana dan apa yang diketahui seseorang tentang sesuatu yang mendorong mereka untuk mengeluarkan tindakan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala tindakan seorang individu tergantung bagaimana seseorang memandang objek tersebut.<sup>23</sup>

Menurut James Rosenau terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan kebijakan luar negeri yaitu ideosinkretik, peranan, birokratis, nasional, dan sistemik. Variabel ideosinkretik atau faktor individu adalah sebuah variabel yang berhubungan dengan pandangan, persepsi, dan karakteristik pribadi seorang pemimpin negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Menurut Theodore A. Coulumbis, karakter psikologis dan kegemaran seorang pembuat kebijakan terhadap sebuah ideologi tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh pada kebijakan politik. Kemudian keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari variabel ideosinkretik tersebut memiliki kecenderungan kepada hasil yang bersifat pragmatis. Coulumbis juga menambahkan bahwa analisa variabel ideosinkretik akan lebih mudah

---

<sup>22</sup> Alex Mintz and Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*

<sup>23</sup> Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989)

dianalisa pada penentuan kebijakan di negara otoriter dan totaliter dibandingkan dengan negara demokratis.<sup>24</sup>

#### **b. Aliansi**

Aliansi merupakan salah satu faktor eksternal yang dikemukakan oleh Alex Mintz dan memengaruhi kebijakan suatu negara. Keinginan suatu negara untuk menerapkan kebijakan tertentu dapat dipengaruhi oleh aliansi yang dijalin dengan negara atau organisasi lain. Aliansi militer merupakan salah satu bentuk aliansi yang dapat memengaruhi suatu negara untuk mempertimbangkan kepentingan nasionalnya terhadap negara lain. Selain itu dapat juga diartikan sebagai ajakan suatu negara untuk bergabung dengan koalisi yang dibentuk atau kebijakan untuk menerima atau menolak ajakan dari negara lain.<sup>25</sup>

#### **c. Kepentingan Ekonomi**

Pengambilan kebijakan luar negeri seringkali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi suatu negara. Kepentingan nasional merupakan dasar negara untuk menerapkan sebuah kebijakan, kepentingan nasional yang paling berpengaruh adalah kepentingan ekonomi. Ketika akses terhadap sumber daya alam terancam, suatu negara akan menerapkan sebuah kebijakan yang mampu mengamankan akses terhadap sumber daya yang menjadi sektor penting dalam menjalankan perekonomian negaranya.<sup>26</sup>

#### **d. Keamanan**

---

<sup>24</sup> Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999)

<sup>25</sup> Alex Mintz and Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*

<sup>26</sup> Alex Mintz and Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*

Para sarjana Hubungan Internasional dan Studi Keamanan sering mengacu berakhirnya Perang Dingin sebagai sebuah peristiwa perubahan yang penting. Perubahan pada pandangan keamanan yang terjadi mengikuti berubahnya kekuatan politik setelah jatuhnya Uni Soviet dan munculnya konflik antarnegara dan sejumlah permasalahan masyarakat dan lingkungan yang menimbulkan beberapa ancaman terhadap kesejahteraan negara dan masyarakat yang pada akhirnya mengacu kepada para analis dan pembuat kebijakan kepada pertanyaan paling dasar apa sebenarnya definisi keamanan.<sup>27</sup>

Mely Caballero-Anthony menyebutkan minimal ada tiga pandangan tentang keamanan. Pandangan pertama adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas dari pada semata-mata keamanan militer (*military security*). Pandangan kedua adalah menentang perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan *status quo*. Pandangan ketiga tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia.<sup>28</sup>

Sumber ancaman tidak lagi hanya bersifat militer. Lebih lanjut, keamanan pun bukan hanya ditujukan bagi kelangsungan negara saja tetapi juga menjadi kebutuhan bagi semua sektor termasuk individu. Ancaman keamanan semakin menunjukkan perluasannya dari perspektif tradisional menjadi non-tradisional. Dalam konsepsi klasik ataupun tradisional, keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari

---

<sup>27</sup> Mely Calballero-Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies (A Transnational Approach)*, Sage Publications Ltd: London, 2016), h. 4-7

<sup>28</sup> Mely Calballero-Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies*, h. 4-7

ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi security hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Disini negara menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan.

Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Buzan menyebutkan bahwa persoalan keamanan tidaklah mungkin hanya menjadi urusan satu negara saja tetapi membutuhkan sebuah koordinasi regional maupun internasional. Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional.<sup>29</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana metode penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif atau pemaparan

---

<sup>29</sup> Barry Buzan, *The Southeast Asian Security Complex*, (Contemporary Southeast Asia Vol. 10, No. 1, June 1988)

dan menjelaskan data-data yang diperoleh lewat pengumpulan data. Metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dalam memecahkan masalah, metode ini berusaha menggambarkan atau melukiskan mengenai situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat hubungan antara fenomena yang diteliti.

### 2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif dimana hanya memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan beserta pola-polanya.<sup>30</sup> Cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis untuk melakukan penelitian yang sifatnya langsung dalam membahas permasalahan ini, sehingga hasil data yang akan dikumpulkan merupakan data sekunder. Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk menyeleksi data yang memiliki sebab akibat disamping juga menjelaskan masalah sesuai pada tempatnya.

### 3. Cara Pengolahan Data

Penulis mempelajari, menganalisa data-data, mencatat dan mengklasifikasi data-data yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok permasalahan serta teori yang digunakan.

---

<sup>30</sup>Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Rajawali Press: Jakarta, 1983), hal. 16-18

#### 4. Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menganalisa data dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan-kenyataan objektif atau dengan mengajukan teori-teori yang relevan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian<sup>31</sup>. dengan demikian penulisa dapat menganalisa data dengan menghubungkan data yang ada secara sistematis kepada variabel-variabel yang ada dalam masalah yang tengah dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan disajikan dalam beberapa bab, yaitu:

##### **Bab 1           Pendahuluan**

Bab ini membahas latar belakang skripsi melalui beberapa penjelasan seperti: pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II         Agresi Israel ke Jalur Gaza Tahun 2014**

Pada bab ini dijelaskan mengenai sejarah agresi Israel ke Palestina. Bab ini kemudian menjelaskan bagaimana awal mula terjadinya agresi Israel ke Jalur Gaza pada tahun 2014. Bab ini juga akan membahas dampak agresi Israel terhadap Jalur Gaza pada tahun 2014.

---

<sup>31</sup>Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Displin dan Metodologi*, h. 92-94

### **Bab III Politik Luar Negeri Mesir**

Pada bab ini penulis akan memaparkan bagaimana orientasi politik luar negeri Mesir dari kepemimpinan Nasser hingga Al Sisi. Kemudian bab ini juga memaparkan hubungan antara Mesir dan Israel serta Amerika Serikat dan hubungan Mesir dengan Palestina. Setelah itu penulis akan menjelaskan mengenai politik luar negeri Mesir masa kepemimpinan Al Sisi. Yang terakhir pada bab ini akan membahas mengenai respon pemerintah Mesir terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014.

### **Bab IV Analisa Respon Pemerintah Mesir terhadap Agresi Israel ke Jalur Gaza Tahun 2014**

Bab ini akan menjelaskan analisa respon pemerintah Mesir terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014 dengan menggunakan kerangka analisa faktor domestik dan eksternal berupa aliansi, kepentingan ekonomi, serta keamanan.

### **Bab V Penutup**

Kesimpulan berisi pemaparan dan analisa di bab-bab sebelumnya. Bab ini menjadi kesimpulan skripsi yang menjelaskan dinamika hubungan Mesir dengan Israel dan Palestina pada masa kepemimpinan Al Sisi. Kemudian bab ini akan membahas kekurangan dari penelitian penulis.



## BAB II

### AGRESI ISRAEL KE JALUR GAZA

Dalam bab II akan memberikan gambaran umum mengenai sejarah agresi Israel ke Jalur Gaza hingga terjadinya agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014. Lalu penulis akan menjabarkan dampak yang diakibatkan dari agresi tersebut.

#### A. Sejarah Agresi Israel ke Jalur Gaza

Konflik antara Israel dan Palestina seringkali dianggap sebagai konflik antaragama, yaitu antara Islam, Yahudi, dan Kristen. Namun, menurut Beverly Milton-Edwards dalam bukunya yang berjudul *The Israeli-Palestinian Conflict: A People's War*, konflik ini berakar dari perjuangan dua bangsa dalam menduduki wilayah, identitas nasional, politik dan penentuan nasib sendiri.<sup>32</sup> Pada 29 November 1947, PBB merencanakan partisi wilayah Palestina bagi Israel dan Palestina dengan komposisi 56% bagian wilayah untuk Israel dan 43% bagian wilayah untuk Palestina. Partisi ini menimbulkan perlawanan dari pihak Arab

---

<sup>32</sup> Beverly Milton-Edwards. *The Israeli-Palestinian Conflict: A People's War*. New York: Routledge. 2009. h. 9

Palestina terhadap Israel, namun militer Arab tidak mampu melawan militer Israel yang lebih unggul.<sup>33</sup>

Pada 15 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Sehari setelah deklarasi kemerdekaan Israel tersebut, negara-negara Arab (Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak) menyerang Israel. Perang tersebut berakhir pada 1949 dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata. Wilayah negara Palestina terbagi menjadi tiga bagian di bawah tiga kepemimpinan politik yang berbeda. Israel mengontrol 77% dari keseluruhan wilayah dan Yordania menguasai Yerusalem Timur serta sebagian Tepi Barat. Sedangkan Mesir mengambil alih Jalur Gaza. Sebagai konsekuensi dari perang Arab-Israel tersebut, lebih dari 700.000 penduduk Palestina mengungsi ke wilayah Yordania, Suriah, dan Lebanon dan tinggal di kamp-kamp pengungsian. Israel merencanakan untuk membangun negara non Yahudi, sehingga mereka mengusir penduduk Palestina. Peristiwa pengusiran penduduk Palestina oleh Israel disebut dengan Al Nakba.<sup>34</sup> Masih ada sekitar 150.000 penduduk Palestina yang tetap tinggal di wilayah negara Israel. Mereka diberikan kewarganegaraan dan hak untuk memilih. Namun mereka dianggap seperti warga kelas dua karena mereka adalah warga non Yahudi.

Perang Enam Hari antara negara-negara Arab dan Israel terjadi pada Juni 1967. Perang 1967 ini, Israel berhasil mengalahkan koalisi Arab dan merebut Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Sepanjang tahun 1967 sampai 1994, Palestina

---

<sup>33</sup> Joel Beinin dan Lisa Hajar, *Palestine, Israel, and the Arab-Israeli Conflict*

<sup>34</sup> Joel Beinin dan Lisa Hajar, *Palestine, Israel, and the Arab-Israeli Conflict*

berada di bawah pengawasan militer Israel langsung. Segala bentuk pelayanan sipil diberikan di tingkat kota oleh dewan kota Palestina. Selain itu, pembangunan dan perencanaan, termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan perlindungan terhadap lingkungan diatur oleh pemerintah pendudukan Israel.

Pergerakan penduduk Palestina serta hak-hak berwarganegara mereka (seperti bekerja, berbicara, berkumpul, dan lain-lain) dibatasi oleh pemimpin militer di wilayah tersebut. Selain itu, mereka kesulitan untuk menjalankan kebudayaan mereka serta menunjukkan nasionalisme mereka dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Israel. Kemudian diberlakukannya jam malam, penghancuran rumah penduduk Palestina, dan penutupan jalan, sekolah, dan komunitas Palestina. Banyak dari para aktivis Palestina dideportasi ke Yordania atau Lebanon dan penyitaan ribuan hektar tanah penduduk Palestina.

Israel juga membangun pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Terdapat sebanyak 145 pemukiman Yahudi yang resmi dan sekitar 100 pemukiman yang dibangun tanpa izin resmi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Selain itu, Israel juga membangun pemukiman di Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza, namun keduanya telah dihancurkan pada tahun 1982 dan 2005 saat Israel menarik pasukannya di wilayah tersebut. Israel juga membangun tembok-tembok pembatas tinggi antara pemukiman Yahudi dengan wilayah penduduk Palestina.

Sebagian masyarakat internasional mengatakan bahwa pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan tersebut adalah hal yang ilegal. Hal ini berlandaskan pada Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 yang melarang otorita menduduki lahan

rakyat yang mereka duduki. Isu pemukiman Yahudi ini dianggap sebagai gagalnya berbagai upaya perundingan damai antara Israel dengan Palestina.

**Gambar II.1 Statistik Pemukiman Yahudi Israel di Wilayah Pendudukan tahun 1972-2008**

<b>Year</b>	<b>West Bank</b>	<b>Gaza Strip</b>	<b>East Jerusalem</b>	<b>Golan Heights</b>	<b>Total</b>
1972	1,182	700	8,649	77	10,608
1983	22,800	900	76,095	6,800	106,595
1985	44,100	1,900	103,900*	8,700	158,700
1989	69,800	3,000	117,100	10,000	199,900
1990	78,600	3,300	135,000	10,600	227,500
1991	90,300	3,800	137,300	11,600	243,000
1992	101,100	4,300	141,000	12,000	258,400
1993	111,600	4,800	152,800	12,600	281,800
1995	133,200	5,300	157,300	13,400	309,200
1996	142,700	5,600	160,400	13,800	322,500
1997	154,400	5,700	161,416	14,300	335,816
1998	163,300	6,100	165,967	14,900	350,267
1999	177,411	6,337	170,123	15,313	369,184
2000	192,976	6,678	172,250	15,955	387,859
2002	214,722	7,277	175,617	16,503	414,119
2003	224,669	7,556	178,601	16,791	427,617
2004	234,487	7,826	181,587	17,265	441,828
2005	258,988	0	184,057	17,793	460,838
2006	268,400	0	186,857	18,105	473,362
2007	276,462	0	189,708	18,692	484,862
2008	295,380	0	n/a	19,083	n/a

Sumber: Central Bureau of Statistics Israel<sup>35</sup>

Pada tanggal 27 Desember 2008-18 Januari 2009, Israel meluncurkan serangan yang disebut sebagai *Operation Cast Lead* dengan bantuan angkatan udara menyerang fasilitas utama Hamas di Gaza. Tujuan utamanya adalah untuk menyerang infrastruktur teroris Hamas untuk meningkatkan keamanan bagi pemukiman di selatan Israel.<sup>36</sup> Israel memperluas serangan ke area yang diyakini merupakan markas dan jaringan pendukung terorisme Hamas, termasuk mesjid, universitas, sekolah, pabrik, rumah dari ketua politik dan militer Hamas, dan juga gudang senjata.<sup>37</sup> Serangan ini menewaskan sebanyak 1400 orang Palestina, termasuk di dalamnya 300 orang anak-anak.<sup>38</sup>

Pada 14 November 2012, Israel memulai serangan besar pertamanya setelah *Operation Cast Lead*. Israel meluncurkan serangan udara yang menargetkan pemimpin serangan Hamas dan fasilitas Hamas, termasuk peluncur roket, gudang senjata, terowongan dan pusat-pusat komando Hamas di Gaza. Serangan militer Israel selama delapan hari di Jalur Gaza tersebut dinamakan *Operation Pillar of Defence*. Serangan yang berakhir atas upaya mediasi yang dilakukan Mesir ini menewaskan 167 orang Palestina dan 6 warga Israel.<sup>39</sup>

## **B. Agresi Israel ke Jalur Gaza Palestina Tahun 2014**

---

<sup>35</sup> Central Bureau of Statistics Israel, *Israeli Settlements*, [http://www.cbs.gov.il/reader/cw\\_usr\\_view\\_folder?ID=141](http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_folder?ID=141) (Diakses pada 3 Juni 2017)

<sup>36</sup> Jim Zanotti, *Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008-2009)*, (Congressional Research Service, February 2009)

<sup>37</sup> Carol Migdalovitz. *Israeli-Arab Negotiations: Background, Conflicts, and U.S. Policy*. Congressional Research Service. 29 Januari 2010.

<sup>38</sup> Amnesty International, *Israel/Gaza Operation 'Cast Lead': 22 Days of Death and Destruction*, (Amnesty International Publishing: United Kingdom, 2009), 6

<sup>39</sup> Yael Stein, *Human Rights Violation during Operation Pillar of Defense*, (B'tselem, Mei 2013), 3

Israel dan Hamas kembali terkunci dalam peperangan yang berkelanjutan. Konflik antara Israel dan Hamas dimulai pada awal Juli 2014 dimana roket-roket dari Gaza diluncurkan ke selatan Israel. Awal mula konflik berasal dari penculikan tiga orang remaja Israel pada 12 Juni 2014. Israel menuduh Hamas sebagai aktor di belakang penculikan tersebut. Namun, Hamas membantah bahwa pihaknya yang melakukan penculikan. Pada tanggal 30 Juni 2014, ditemukan tubuh tiga orang remaja Israel tersebut terkubur di Tepi Barat setelah pencarian intensif. Hal tersebut membuat pihak Israel marah dan merencanakan pembalasan terhadap Hamas.<sup>40</sup>

Israel melakukan penangkapan ratusan anggota Hamas yang dicurigai melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 3 orang remaja Israel. Pada waktu yang sama, Hamas melancarkan serangan roket dan mortar besar-besaran dari Jalur Gaza ke wilayah pemukiman Israel. Israel meresponnya dengan melancarkan serangan udara untuk mengakhiri serangan. Namun, Hamas semakin meningkatkan serangannya sehingga Israel tidak mempunyai pilihan selain melancarkan serangan militer besar-besaran.<sup>41</sup>

Pada 7 Juli 2014, Israel meluncurkan operasi militer ke Jalur Gaza yang dinamakan *Operation Protective Edge*. Tujuan penyerangan Israel ini adalah untuk mencegah dan membalas roket-roket yang dikirimkan Hamas dari Jalur Gaza dan menghancurkan infrastruktur Hamas. Operasi militer ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu serangan udara, darat, dan laut tanggal 7-16 Juli 2014; serangan

---

<sup>40</sup> Endalcachew Bayeh, The Current War on Gaza: A Challenge to the Principle of the Responsibility to Protect, (Global Journal of Political Science and Administration, Vol. 4, No. 2, Mei 2016), 80-81

<sup>41</sup> Eitan Shamir, The 2014 Gaza War: Rethinking Operation Protective Edge, 2

darat dengan fokus untuk memasuki Jalur Gaza tanggal 17-5 Agustus 2014; serangan-serangan secara bergantian antara Israel dan Hamas hingga ditentukan kesepakatan gencatan senjata pada 26 Agustus 2014.<sup>42</sup>

*Operation Protective Edge* merupakan operasi militer Israel yang paling lama dan sangat intens terhadap Hamas. Operasi militer ini berlangsung selama 51 hari. Selama operasi militer, Hamas meluncurkan hampir sebanyak 4600 mortar dan roket yang mencapai Israel. Sedangkan dari pihak Israel menyerang ribuan target di Jalur Gaza, menghancurkan infrastruktur Hamas, dan menargetkan komandan militer Hamas dan Islam Jihadis.<sup>43</sup> Pada tahap pertama operasi militer ini, UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) melaporkan kematian 214 orang Palestina yang 77% merupakan warga sipil. Kemudian lebih dari 1.438 orang Palestina terluka dan sekitar 2.174 rumah, 33 sekolah, 43 mesjid, 16 kantor NGO, 4 rumah sakit berhasil dihancurkan pasukan militer Israel di berbagai penjuru Jalur Gaza.<sup>44</sup>

Pada 17 Juli, Hamas mencoba memasuki Israel bagian selatan melalui terowongan bawah tanah namun gagal karena hal tersebut dapat diketahui oleh pihak Israel. Israel mengumumkan adanya pergerakan bawah tanah melalui terowongan-terowongan dari Gaza. Konflik semakin berlanjut dengan banyaknya bangunan-bangunan yang hancur dan bertambahnya jumlah korban. Pada 4 Agustus dilaporkan oleh UNOCHA terdapat 67 orang Israel tewas, termasuk 64

---

<sup>42</sup> Beit Hanoun, *Trapped and Punished: The Gaza Civilian Population under Operation Protective Edge*, (FIDH Field Mission, Oktober 2014), 10

<sup>43</sup> Harel Chorew, *The Road to Operation Protective Edge: Gaps in Strategic Perception*, (Israel Journal of Foreign Affairs VIII:5, 2014), 9

<sup>44</sup> Beit Hanoun, *Trapped and Punished: The Gaza Civilian Population under Operation Protective Edge*, 11

tentara dan 2 warga sipil. Sedangkan di pihak Palestina 1814 orang dilaporkan tewas dengan 85% persentase merupakan kematian warga sipil. Sebanyak 520.000 warga Gaza kehilangan rumah tinggal, 7198 orang luka-luka.<sup>45</sup>

Pada tanggal 4-19 Agustus konflik dihentikan sementara waktu dan dimulai kembali pada 19 Agustus. Selama waktu tersebut, jumlah korban yang jatuh tidak sebanyak pada hari-hari sebelumnya. UNOCHA melaporkan pada tanggal 26 Agustus jumlah korban tewas di pihak Palestina sebanyak 2.256 orang, dengan 1.568 orang adalah warga sipil (538 anak-anak dan 306 wanita). Sedangkan kematian di pihak Israel menapai 71 orang, termasuk 66 tentara Israel, 1 petugas keamanan, 4 warga sipil.<sup>46</sup>

Mesir sebagai mediator meninsisiasi adanya perjanjian gencatan senjata selama 72 jam. Selama gencatan senjata tersebut Israel mengklaim terhadap demiliterisasi di Gaza, sedangkan Palestina menuntut untuk pencabutan blokade yang menghancurkan ekonomi Gaza. Selain itu penduduk Gaza tidak dapat meninggalkan Gaza selama konflik dan tidak mendapatkan asuransi kesehatan dan pendidikan. Perjanjian gencatan senjata ini bertujuan untuk memberikan efek jangka panjang bagi perdamaian kedua pihak. Namun, perjanjian tersebut tidak menghasilkan dan berjalan sesuai rencana.

---

<sup>45</sup> Beit Hanoun, Trapped and Punished: The Gaza Civilian Population under Operation Protective Edge, 12

<sup>46</sup> Beit Hanoun, Trapped and Punished: The Gaza Civilian Population under Operation Protective Edge, 11, 12-13



### **C. Dampak Agresi Israel Terhadap Jalur Gaza Tahun 2014**

Selama empat pekan Jalur Gaza menjadi target serangan darat, udara dan laut Israel. Jalur Gaza adalah kawasan yang kerap dilanda perang dan rumah bagi pengungsi Palestina. Gaza kini menyisakan penderitaan dan arus pengungsian warga yang sejak bertahun-tahun hidup sebagai pengungsi. Akibat rusaknya ribuan rumah warga Palestina yang menjadi target operasi militer Israel, tercatat 100 ribu warga Palestina kehilangan rumah dan membutuhkan tempat mengungsi. Selain itu, sebagian besar infrastruktur pertanian di Jalur Gaza juga rusak berat dan hancur akibat serangan Israel ke kawasan ini.

Dampak perang Jalur Gaza mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Bukan hanya membuat warga Palestina menjadi pengungsi, namun seluruh penduduk Jalur Gaza kini membutuhkan bantuan makanan dan pemulihan sektor pertanian di daerah ini. Selain itu agresi Israel ke Jalur Gaza mengakibatkan kerusakan lingkungan dan unsur-unsurnya dalam segala sektor, terutama tempat tinggal, pertanian, kesuburan tanah, air dan lain penopang kehidupan lainnya.

Para pakar menyatakan, bahwa agresi Israel telah meninggalkan tanah menjadi terbakar. Sebagian besar wilayah Jalur Gaza tidak layak untuk ditinggali dan ditanami serta tidak mungkin dipulihkan. Ini akibat pencemaran akibat agresi berulang-ulang di Jalur Gaza. Bahkan harus ada analisis kimia dan radiasi untuk memastikan bahayanya di masa mendatang bagi kesehatan lingkungan dan manusia di Jalur Gaza. Selain itu, lalu lintas peralatan berat militer Israel dan dampak kerusakannya di Jalur Gaza menyebabkan kerusakan fisik tanah dan

mengurangi oksigen dan tingkat serapan air serta mematikan tanah. Ini membutuhkan rehabilitasi jangka panjang dan biaya besar.

## **1. Korban Jiwa dan Luka**

### **a. Pihak Palestina**

UNOCHA melaporkan bahwa terdapat 2.256 orang Palestina meninggal, termasuk 1.568 orang adalah warga sipil (538 anak-anak dan 306 wanita).<sup>47</sup> Laporan awal untuk UNOCHA memperkirakan bahwa 1.717 (68%) dari 1.167 korban tewas yang identitasnya sejauh ini sudah dikenali merupakan warga sipil; 573 di antaranya (33% dari total korban tewas) adalah wanita atau anak-anak.<sup>48</sup> Namun dalam berita yang disampaikan melalui website Reuters pada tanggal 2 Agustus 2014, Israel bersikukuh bahwa sedikitnya 47% korban tewas di Gaza adalah kombatan. Pasukan Pertahanan Israel menyatakan bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai hidup. Hamas membantah kabar bahwa pihaknya menggunakan perisai hidup dan 44% teritori Jalur Gaza ditetapkan sebagai zona kosong oleh militer Israel.<sup>49</sup>

### **b. Pihak Israel**

---

<sup>47</sup> Gaza Emergency Situation Report. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Occupied Palestinian Territory 10 October 2014.

[https://www.ochaopt.org/documents/ocha\\_opt\\_sitrep\\_14\\_10\\_2014.pdf](https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_14_10_2014.pdf) (Diakses 12 September 2016)

<sup>48</sup> Gaza Emergency Situation Report. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Occupied Palestinian Territory 3 August 2014.

[http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha\\_opt\\_sitrep\\_04\\_08\\_2014.pdf](http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_sitrep_04_08_2014.pdf) (Diakses 12 September 2016)

<sup>49</sup> Reuters, Israeli says has evidence 47 percent of Gaza dead were combatants

<http://www.reuters.com/article/us-mideast-gaza-casualties-idUSKBN0G20HF20140802>

UNOCHA melaporkan kematian di pihak Israel menapai 71 orang, termasuk 66 tentara Israel, 1 petugas keamanan, 4 warga sipil.<sup>50</sup>

## **2. Tempat Tinggal, Infrastruktur Umum dan Kelangkaan Medis**

Agresi yang diluncurkan Israel ke Jalur Gaza telah membuat sekiranya 140.000 penduduk Gaza atau total 8% dari populasi Gaza kehilangan tempat berlindung. Hal ini dua kali lebih banyak dari jumlah pada tahun 2008-2009. Sebanyak 3.230 rumah telah hancur rata dengan tanah dan sekitar 3.750 lainnya membutuhkan perbaikan. Selain itu setidaknya 1,2 juta penduduk Gaza atau sekitar 70% dari total populasi Gaza kesulitan mendapatkan air bersih dan sanitasi.<sup>51</sup>

Persediaan air yang sedikit menjadi perhatian utama. Selain itu, sekitar 135.500 orang membutuhkan tempat untuk berlindung karena rumahnya sudah rata dengan tanah dan tidak bisa ditempati lagi. Disamping kesulitan air dan tidak adanya tempat untuk berlindung, warga yang selamat tidak mendapat aliran listrik karena rusak oleh serangan udara Israel. Hal ini membuat penduduk Palestina harus menerima pemadaman bergantian yang bisa mencapai 22 jam per hari atau hanya mendapat pasokan listrik selama 2 atau 3 jam per hari. Selain itu perlindungan yang memadai berupa fasilitas kesehatan dan kurangnya personel kesehatan menghambat bantuan darurat kepada yang sakit dan terluka. Akses

---

<sup>50</sup> Gaza Emergency Situation Report. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Occupied Palestinian Territory 10 October 2014.

[https://www.ochaopt.org/documents/ocha\\_opt\\_sitrep\\_14\\_10\\_2014.pdf](https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_14_10_2014.pdf) (Diakses 12 September 2016)

<sup>51</sup> ACAPS, Humanitarian Impact of Operation Protective Edge in Gaza Strip.

<https://www.acaps.org/country/palestine/special-reports> (Diakses 12 September 2016)

kepada yang terluka serta yang sakit parah terbatas karena operasi militer yang sedang berlangsung. Pintu perbatasan Rafah dibuka pada tanggal 23 Juli dari pukul 9 sampai dengan 3 sore hanya untuk transit para warga yang terluka dan warga negara asing. Sehari sebelumnya tidak ada yang boleh meninggalkan Gaza melalui pintu perbatasan manapun.<sup>52</sup>

### 3. Gangguan Psikologis (Jiwa) dan Cacat Permanen

UNOCHA memperkirakan bahwa sedikitnya 373.000 anak membutuhkan bantuan psikososial.<sup>53</sup> Kepadatan yang berlebihan, ditambah terbatasnya akses staf kemanusiaan ke tempat-tempat tertentu, terus mengurangi kualitas hidup di beberapa pengungsian dan meningkatkan kekhawatiran soal perlindungan. Para pekerja medis mengatakan bahwa remaja Israel yang rawan terkena gangguan jiwa terus menderita saat konflik jangka pendek maupun jangka panjang. Sejumlah pakar mengidentifikasi sejumlah gejala kesehatan jiwa yang muncul sepanjang konflik seperti kegelisahan, depresi, gangguan obsesif-kompulsif, sensitivitas interpersonal, fobia, dan paranoia. Banyak yang meragukan gejala kesehatan ini akan berkurang setelah konflik berakhir.<sup>54</sup>

Lebih dari 1.000 anak-anak Palestina di Jalur Gaza menjadi cacat permanen akibat serangan Israel selama 51 hari pada serangan tahun 2014. Hal tersebut disampaikan *Defense of Children International* (DCI), sebuah LSM yang

---

<sup>52</sup> ACAPS, Humanitarian Impact of Operation Protective Edge in Gaza Strip. <https://www.acaps.org/country/palestine/special-reports> (Diakses 12 September 2016)

<sup>53</sup> UNOCHA, Gaza Emergency Situation Report 10 Oktober 2014

<sup>54</sup> Humanitarian Response Plan January-December 2016. Occupied Palestinian Territory. [https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/2016\\_hrp\\_22\\_january\\_2016.pdf](https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/2016_hrp_22_january_2016.pdf) (Diakses 12 September 2016)

ditujukan untuk membela hak-hak anak. DCI juga melaporkan bahwa satu tahun penuh setelah serangan Israel itu, ribuan korban, termasuk sejumlah besar anak-anak terus menderita luka dan trauma psikologis.<sup>55</sup>

#### **4. Kerugian Ekonomi**

##### **a. Pihak Israel**

Serangan Israel ke jalur Gaza telah merugikan negara Israel sendiri yang jauh lebih besar daripada kematian 64 tentara mereka, dengan tumbuhnya ketidakpuasan di dalam negeri dan dampak ekonomi yang negatif. Kondisi ekonomi Israel mengalami krisis yang semakin parah akibat agresi ke Gaza yang mengeluarkan biaya besar. Hal ini terlihat dengan adanya defisit anggaran hingga 3,2 persen pada tahun 2013 sampai 2014.

Berdasarkan laporan dari *Middle East Monitor* (MEMO) bahwa sekitar 70 persen lembaga, pabrik dan peternakan Israel berhenti beroperasi. Hal tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi hampir 950 dollar AS atau sekitar Rp 11,2 T. Ditambah dengan perkiraan kerugian dari sektor perhotelan sebesar 99 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 T dari wisatawan asing yang telah membatalkan perjalanan menuju Israel.<sup>56</sup>

Roket-roket milik gerakan perlawanan Palestina telah menimbulkan kerugian besar terhadap perekonomian Isarel. Di mana agresi tersebut memaksa

---

<sup>55</sup> Defense for Children International Palestine. Annual Reports 2014. [https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci\\_report\\_2015\\_english\\_small.pdf?1435333791/](https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791/) (Diakses pada 12 September)

<sup>56</sup> Eran Yashiv, Operation Protective Edge: Economy Summary, (Institute for National Security Studies, 2014)

para pengusaha untuk memindahkan bisnis dan proyek mereka ke daerah utara. Kemudian, mencari daratan yang diyakini lebih aman dari serangan perlawanan Palestina. Hal tersebut telah menyebabkan masyarakat Israel yang tinggal di daerah utara Israel melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah utara Gaza.

Pada akhir Maret 2014 diperkirakan oleh Biro Pusat Statistik Israel bahwa wilayah selatan tersebut merupakan wilayah yang memberikan kekuatan ekonomi sekitar 10 persen. Selain itu, wilayah tersebut juga memberikan kontribusi sebesar 8% dari total ekspor luar negeri Israel. Hampir 30 persen para pekerja di pusat Israel telah kembali bekerja di pabrik-pabrik di dalam tempat penampungan yang dibuat khusus untuk masa perang. Namun hal tersebut tidak cukup berpengaruh besar karena kurangnya lingkungan kerja yang sesuai di dalam penampungan tersebut telah mengakibatkan berkurangnya kapasitas produksi Israel sebanyak 40 persen. Karena hal tersebut, beberapa pemilik pabrik dan peternakan menuntut Departemen Keuangan Israel untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita mereka. Sektor swasta Israel mengalami kerugian hingga 1.25 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,4 T akibat perang yang dilancarkan Israel terhadap Gaza.<sup>57</sup>

Konflik di Gaza turut merugikan perekonomian Israel dan sudah ratusan juta NIS (*New Israel Shekel*) yang hilang, baik berupa potensi pendapatan dan biaya produksi yang harus ditanggung. Dampak agresi Israel ke Gaza mulai mengganggu nilai tukar uang hingga melemahkan kondisi ekonomi Israel. Pada tanggal 7 Oktober 2014 nilai tukar dollar AS terhadap mata uang Israel mengalami kenaikan di Israel sampai 3,75 NIS/USD.

---

<sup>57</sup> Eran Yashiv, Operation Protective Edge: Economy Summary

Ini pertama kalinya sejak 18 bulan terakhir setelah mata uang Israel mengalami penurunan terus menerus sejak agresi Israel ke Jalur Gaza. Kenaikan dollar ini memaksa bank sentral Israel membeli 200 juta dollar untuk membatasi kenaikan dollar AS. Diperkirakan dollar AS akan terus naik dibanding mata uang Israel, Shekel. Selama dua bulan terakhir Shekel turun drastis. Penurunan Shekel juga akan mengakibatkan Bank Israel menurunkan suku bunga untuk ke sekian kalinya hingga 0,05 sehingga para investor akan membeli Shekel karena besarnya selisih keuntungan dan menurunnya tingkat penjualan apartemen selama tahun depan.<sup>58</sup>

Akibat agresi tersebut, Israel mengalami kerugian mencapai 110 juta Shekel per hari untuk biaya operasi militer Israel di Jalur Gaza yang telah mencapai jumlah sekitar satu miliar Shekel. Volume pertukaran perdagangan di kota-kota Israel selatan mengalami penurunan antara 60% sampai 70%, transportasi dan telekomunikasi turun 20%, dan indeks pariwisata turun 50%, yang mana akan mempengaruhi tingkat pemasukan pajak untuk kepentingan keuangan Israel secara umum.<sup>59</sup> Pengaturan ekonomi yang diperuntukan bagi belanja militer untuk mendukung keberlanjutan operasi militer di Gaza mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi warga Israel

#### **b. Pihak Palestina**

Agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014 adalah yang paling berat dan paling lama, yang mengakibatkan dampak buruk pada rakyat serta kondisi hidup warga

---

<sup>58</sup> Eran Yashiv, Operation Protective Edge: Economy Summary

<sup>59</sup> Eran Yashiv, Operation Protective Edge: Economy Summary

Palestina. Wilayah Gaza menjadi daerah yang hancur dan memerlukan pembangunan kembali. Berdasarkan data dari Ketua Serikat Industri Palestina di Jalur Gaza, agresi Israel ke Jalur Gaza telah menghancurkan sekitar 450 pabrik dan sebanyak 500 pabrik serta fasilitas industri rusak.<sup>60</sup> Pabrik-pabrik dan fasilitas industri yang dihancurkan Israel merupakan tulang punggung ekonomi nasional Palestina, karena mencakup industri pokok ribuan warga Gaza.

Serikat Pekerja Palestina menegaskan kerugian akibat agresi Israel Jalur Gaza berakibat pada sektor lapangan kerja sehingga melumpuhkan lebih dari 360 ribu pekerja Palestina. Kerugian mencapai 73 juta dollar AS. Angka kerugian akan meningkat lebih tinggi jika otoritas Palestina ikut menghitung kerugian yang diderita oleh 1,8 juta penduduk Gaza.<sup>61</sup>

Sedikitnya terdapat 18 ribu rumah yang hancur atau dalam keadaan rusak. Sekitar 100 ribu orang terpaksa kehilangan rumah dan 111 fasilitas PBB hancur akibat serangan udara Israel. Agresi Israel ke jalur Gaza berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Gaza, setelah tujuh tahun sebelumnya ekonomi mengalami peningkatan, kini Palestina kembali mengalami penurunan kondisi ekonomi hingga 4%. Hal itu tidak saja disebabkan adanya agresi Israel, namun juga adanya pembatasan alur distribusi barang menuju Gaza dan penurunan bantuan asing ke otoritas Palestina.<sup>62</sup>

## **5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

---

<sup>60</sup> Eran Yashiv, Operation Protective Edge: Economy Summary

<sup>61</sup> Eran Yashiv, Operation Protective Edge: Economy Summary

<sup>62</sup> Viva News, Usai Perang, Israel dan Palestina Sepakat Bangun Kembali Gaza.

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/539336-usai-perang-israel-dan-palestina-sepakat-bangun-kembali-gaza> (diakses 14 September 2016)



Terdapat ribuan warga Palestina menjadi korban serangan Israel bahkan relawan yang membantu ikut menjadi korban. Dalam masa kanak-kanak anak Palestina, hampir tidak ada masa kecil yang indah dan menyenangkan. Ketika anak-anak sebaya mereka di belahan dunia lain sibuk bermain, anak-anak Palestina terjebak dalam baku tembak, ledakan roket dan bom bahkan menyaksikan orangtua, kerabat, dan tetangganya menjadi korban dari peperangan dengan Israel.

Selama agresi ke Jalur Gaza, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia dan yang terluka akibat serangan rudal yang dilancarkan oleh Israel. Seorang juru bicara UNRWA, Chris Gunness, mengatakan anak-anak dibunuh ketika mereka sedang tidur bersama orang tuanya di ruang kelas di Jabaliya yang menjadi tempat penampungan pengungsi.<sup>63</sup>

Organisasi HAM Amnesty International mengatakan Israel melakukan kejahatan perang di Gaza dengan penghancuran empat bangunan gedung tinggi yang dihuni warga sipil. Banyak warga Gaza cedera dan ratusan lainnya kehilangan rumah, bisnis dan barang pribadi akibat pengeboman tersebut. Israel melancarkan serangan dalam jumlah luar biasa terhadap rumah-rumah penduduk, sehingga mengakibatkan kematian dan kerusakan yang semakin meningkat.

Human Right Watch (HRW) menyatakan bahwa polisi Israel seringkali mengancam dan mengintimidasi anak-anak Palestina di dalam tahanan. Padahal

---

<sup>63</sup> BBC, Serangan Israel ke sekolah PBB di Gaza.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140730\\_gaza](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140730_gaza) (Diakses pada 14 September 2016)

menurut HRW yang dilakukan tentara Israel, termasuk menginterogasi tanpa kehadiran orang tua dan merupakan pelanggaran menurut hukum internasional.<sup>64</sup> Apa yang dilakukan oleh pasukan Israel nantinya membuat anak-anak Palestina trauma ketika dewasa. Kondisi anak-anak yang ditangkap tentara Israel juga memprihatinkan. Bagi anak-anak Palestina, setiap saat ketakutan, kekerasan, ancaman, penyiksaan dan pembunuhan.<sup>65</sup>



### **BAB III**

#### **POLITIK LUAR NEGERI MESIR**

Bab ini menjabarkan orientasi politik luar negeri Mesir dan hubungan Mesir dengan Israel. Selain itu juga akan menjabarkan politik luar negeri Mesir

---

<sup>64</sup> Human Rights Watch, Israel: Security Forces Abuse Palestinian Children <https://www.hrw.org/news/2015/07/19/israel-security-forces-abuse-palestinian-children> (diakses 15 September 2016)

<sup>65</sup> Human Rights Watch, Israel: Security Forces Abuse Palestinian Children

masa kepemimpinan Al Sisi dan respon pemerintah Mesir terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014.

#### **A. Orientasi Politik Luar Negeri Mesir**

Politik luar negeri suatu negara dapat didefinisikan melalui beberapa pertimbangan atau faktor. Untuk memahami dan melihat bagaimana orientasi politik luar negeri Mesir, terdapat faktor-faktor yang paling sering digunakan yaitu lokasi geografis, sejarah, warisan budaya sosial, kepentingan nasional, serta kepentingan ekonomi dan pengaruh politik. Selain itu, ideologi (agama maupun politik) yang dianut oleh seorang pemimpin sebuah negara juga memegang peran yang signifikan dalam memberikan dampak bagi orientasi politik luar negeri suatu negara.<sup>66</sup> Sejak Perang Dunia II berakhir, politik luar negeri Mesir telah mengalami setidaknya lima era. Setiap era mempunyai ciri khas, prinsip, dan objektivitas masing-masing pemimpin.

Secara geografis, Mesir berada pada lokasi persimpangan antara Timur Tengah, Laut Tengah atau Mediterania, dan Sub Sahara Afrika. Letak geografis Mesir tersebut menjadikan Mesir sebuah negara yang memiliki kekayaan sejarah, warisan budaya sosial, serta jaringan yang luas. Mesir menjadi tempat berkumpul tiga agama besar di dunia yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Terusan Suez yang berada di Mesir menghubungkan antara dunia Barat dan Timur. Memiliki luas wilayah sebesar 1,02 juta km<sup>2</sup> menjadikan Mesir mempunyai peran yang signifikan di kawasan dan dunia internasional. Mesir merupakan negara yang

---

<sup>66</sup> Hassan Nafaa, *Egypt's Foreign Policy: Challenges and prospects for correction*, (Al Jazeera Centre for Studies, February 2010), 2

menghubungkan bagian timur dan bagian barat dari dunia Arab. Letak geografis Mesir otomatis menjadikannya sebagai pusat dari dunia Arab.<sup>67</sup>

Mesir menempatkan politik luar negerinya dalam empat bagian dimana terdapat negara-negara yang penting bagi Mesir. Yang *pertama* adalah negara-negara Arab. Dalam hubungannya dengan negara Arab, Mesir condong kepada tiga negara yaitu Sudan, Palestina, dan Arab Saudi. Sudan dan Mesir telah menjalin kerjasama jauh sebelum kedua negara merdeka. Keduanya sama-sama memiliki ketergantungan terhadap Sungai Nil. Meskipun hubungan keduanya mengalami pasang surut akibat perubahan rezim yang berbeda ideologi namun keduanya tetap mempertahankan hubungan baik. Selain Sudan, Palestina juga menjadi fokus Mesir. Palestina merupakan negara kunci dalam konflik Arab-Israel. Palestina juga dianggap penting bagi Mesir untuk menunjukkan pengaruhnya di kawasan. Negara lainnya yaitu Arab Saudi dimana keduanya memiliki hubungan dalam bidang agama dan ekonomi, dalam hal ini minyak lebih dominan. Selain itu, Arab Saudi juga merupakan negara pendonor bantuan kepada Mesir.

Bagian *kedua* yaitu negara Israel. Mesir menjadikan Israel sebagai negara strategis di kawasan Timur Tengah karena militernya yang kuat dan tangguh serta mempunyai peran penting dalam keamanan nasional Mesir di Semenanjung Sinai. Selain itu, Israel juga merupakan negara kunci dalam konflik Arab-Israel. Bagian *ketiga* yaitu negara adikuasa seperti Amerika Serikat. Mesir mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat. AS menganggap Mesir

---

<sup>67</sup> Chen Tianshe, *Four Points toward the Understanding of Egypt's Foreign Relations*, (Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia, Vol. 5, No. 1, 2011), 84

sebagai kunci aliansinya di Timur Tengah. Keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam banyak hal seperti menjaga kestabilan kawasan, mencegah radikalisme dan terorisme, serta mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.<sup>68</sup>

Bagian *keempat* yaitu negara di benua Eropa dan Afrika. Mesir dalam sejarahnya mempunyai hubungan yang dekat dengan negara-negara Eropa. Hal ini terlihat bahwa Mesir pernah dijajah oleh bangsa Eropa (Perancis dan Inggris). Setelah tahun 1973, hubungan Mesir dengan bangsa Eropa mulai meningkat dengan adanya kerjasama bilateral dan politik. Hubungan keduanya berkembang cukup pesat ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama, kunjungan pemimpin negara Eropa dan Mesir, perdagangan yang meningkat, dan Eropa menjadi salah satu negara pendonor terbesar kepada Mesir.<sup>69</sup>

Lalu Mesir juga menjalin hubungan dekat dengan negara-negara Afrika. Pada saat Mesir di bawah kepemimpinan Nasser, Mesir menjadi negara yang mendukung gerakan nasional pembebasan di Afrika. Hubungan keduanya mengalami pasang surut namun tetap saling mendukung. Mesir di bawah Mubarak mendukung adanya zona bebas nuklir di Afrika dan Mesir memerankan peran yang signifikan sebagai mediator beberapa konflik di Afrika. Mesir menandatangani kerjasama ekonomi dan teknologi dengan beberapa negara Afrika.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Mohamed Kadry Said, *Egypt's Foreign Policy in Global Change: The Egyptian Role in Regional and International Politics*, (FES Briefing Paper 11, September 2006), 6

<sup>69</sup> Chen Tianshe, *Four Points toward the Understanding of Egypt's Foreign Relations*, 85-88

<sup>70</sup> Chen Tianshe, *Four Points toward the Understanding of Egypt's Foreign Relations*, 85-88

Jon B. Alterman menjabarkan tujuan politik luar negeri Mesir ke dalam lima bagian, sebagai berikut:

1. Melindungi batas negara. Israel merupakan tetangga satu-satunya Mesir yang mempunyai militer kuat dan menjadi ancaman yang besar bagi Mesir. Sejak Perjanjian Damai 1979, konflik antara keduanya bisa diatasi di atas meja perundingan.
2. Melindungi Mesir itu sendiri. Dalam politik domestic, terdapat beberapa partai dan kelompok oposisi dan gerakan radikal. Kerjasama yang dilakukan Mesir dengan dukungan eksternal dapat mengendalikan dan mencegah terorisme dari kelompok radikal tersebut.
3. Meningkatkan perdagangan dan ekonomi nasional. Perdagangan dengan negara-negara Arab runtuh ketika Mesir berdamai dengan Israel. Namun, dukungan bantuan dari AS dan negara-negara Eropa telah memberikan pemasukan yang baik bagi keberlangsungan perdagangan dan ekonomi nasional Mesir.
4. Menarik bantuan luar negeri. AS memberikan bantuan sebanyak 1,12 juta dollar per tahun untuk bantuan ekonomi bagi Mesir. Selain itu, Mesir berharap negara-negara Eropa, Jepang, China, dan negara-negara Arab mau memberikan bantuan luar negeri bagi Mesir.
5. Meningkatkan posisi politik pemerintah di rumah sendiri.<sup>71</sup>

Berdasarkan Konstitusi Permanen Mesir 1971 dalam Bab Sistem Pemerintahan Mesir merupakan sebuah negara republik presidensial dimana

---

<sup>71</sup> Jon B. Alterman, *Dynamics Without Drama: New Options and Old Compromises in Egypt's Foreign Policy*, *Cambridge Review of International Affairs*, Vol 18 No. 3, Oktober 2005), 361

presiden mendominasi berjalannya kehidupan politik Mesir.<sup>72</sup> Ketika merancang sebuah kebijakan luar negeri, presiden hampir memiliki hak absolut dalam perumusannya. Tidak seperti negara Arab lainnya, politik luar negeri Mesir tidak berlandaskan institusionalisme. Ketika berganti masa kepresidenan, maka berganti pula arah politik luar negerinya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa perumusan kebijakan luar negeri adalah hak milik presiden dan presiden berhak menentukan arah politik luar negeri Mesir.<sup>73</sup> Hal ini menunjukkan bahwa proses perumusan politik luar negeri Mesir ditandai dengan adanya individualitas presiden yang sedang menjabat. Penulis akan menjabarkan politik luar negeri Mesir berdasarkan kepemimpinan masing-masing presiden.

#### 1. Gamal Abdel Nasser

Gamal Abdel Nasser menduduki kursi kepemimpinan di Mesir setelah kudeta militer pada 1952. Nasser mempunyai peran yang besar dalam membangun pemerintahan Mesir yang baru selama beberapa tahun hingga akhirnya menjadi presiden terpilih Mesir. Nasser membawa sebuah sistem dan identitas baru bagi Mesir dimana dia mentransformasi kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi Mesir. Dalam kepemimpinannya, Mesir memberikan dukungan yang besar bagi gerakan nasional pembebasan di Asia dan Afrika. Hal tersebut karena Nasser ingin menghapuskan kolonialisme dan imperialism di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Mesir pada perang Arab melawan Israel tahun 1948 dan 1967.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> State Information Service, The Constitution, <http://www.sis.gov.eg/section/28/2603?lang=en-us> (diakses pada 22 Juni 2017)

<sup>73</sup> Jing Wang, *An Analysis of Egypt's Foreign Policy*. (West Asia and Africa, No. 4, 2006), 32

<sup>74</sup> Chen Tianshe, *Four Points toward the Understanding of Egypt's Foreign Relations*, 95

Karena besarnya rasa tanggungjawab Nasser terhadap bangsa Arab, Nasser menginginkan bangsa Arab untuk bersatu. Hal ini yang memunculkan paham Pan Arabisme pada masa kepemimpinan Nasser. Selain itu, Nasser juga mendukung nasionalisasi Terusan Suez. Mesir di bawah kepemimpinan Nasser berada pada pihak yang netral dimana Mesir bergabung dengan Gerakan Non Blok (GNB). Hal ini dapat dilihat dengan Nasser menganut ideologi sosialisme yang dibawa oleh Uni Soviet. Namun tetap mempertahankan hubungannya dengan Amerika Serikat.<sup>75</sup>

## 2. Anwar Sadat

Pada masa kepemimpinan Nasser, Mesir lebih cenderung kepada paham Pan Arab dan menyatukan bangsa Arab. Berbeda dengan kepentingan Anwar Sadat, Mesir lebih fokus pada kepentingan nasional Mesir. Sadat mengesampingkan Pan Arabisme Nasser dan mengubah identitas politik luar negeri Mesir. Kekalahan perang melawan Israel yang dialami Mesir pada masa Nasser, memberikan kerugian ekonomi yang besar bagi pemerintahan Sadat. Hal ini membuat Anwar Sadat membawa Mesir kepada kebijakan pintu terbuka atau *infatih* untuk menarik investasi asing ke Mesir. Selain itu, Sadat juga mengubah ideologi sosialisme Mesir menjadi menganut paham liberalisme.<sup>76</sup>

Hubungan Mesir-Israel ikut mencair dengan Sadat mengunjungi Yerusalem di Israel. Mesir dan Israel mengusung perjanjian damai yang disponsori oleh AS. Pada tahun 1979, Mesir dan Israel resmi menandatangani Perjanjian Camp David

---

<sup>75</sup> Hassan Ahmadian, Egyptian Foreign Policy Identities, (Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 5 No. 3, 2014), 8

<sup>76</sup> Azzura Meringolo, From Morsi to Al Sisi: Foreign Policy at the Service of Domestic Policy, (Istituto Affari Internazionali, Insight Egypt No. 8, Maret 2015), 11



dan dengan otomatis Mesir negara Arab pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Mesir di bawah kepemimpinan Sadat memilih untuk memihak pada Amerika Serikat dan berpaling dari Uni Soviet.<sup>77</sup> Dengan menunjukkan konsistensi keberpihakan Mesir pada AS, Sadat mendapatkan bantuan keuangan yang sangat besar dari AS mencapai 60 miliar dollar.<sup>78</sup>

### 3. Hosni Mubarak

Mesir di bawah Mubarak memiliki tantangan baru dalam membentuk identitas politik yang stabil. Pandangan Mubarak pada orientasi politik luar negerinya terbagi menjadi dua dimensi. Pada satu sisi Mesir ingin memperbaiki hubungan dengan bangsa Arab, di lain sisi Mesir ingin menjaga hubungan baiknya dengan AS, dan melanjutkan hubungan damai dengan Israel. Pendekatan kembali Mesir dengan bangsa Arab ditunjukkan Mubarak dalam dukungannya terhadap Irak dalam perang 8 tahun, dukungan Mesir terhadap Suriah dalam ketegangannya dengan Turki, menjadi penjaga Teluk Persia, serta menjadi anggota Dewan Kerjasama Arab.<sup>79</sup>

Kembalinya Kairo sebagai markas Liga Arab merupakan keberhasilan Mesir dalam usaha pendekatannya terhadap bangsa Arab. Mesir kembali mendekati Arab dan Suriah untuk melakukan kerjasama. Kemudian Mubarak menunjukkan perannya sebagai negara terbesar di Timur Tengah dengan memediasi konflik antara Israel dan Palestina. Namun Mesir dianggap gagal dalam perannya sebagai pihak yang netral karena Mesir cenderung berpihak kepada Israel. Hal ini dapat

---

<sup>77</sup> Hassan Ahmadian, *Egyptian Foreign Policy Identities*, 8

<sup>78</sup> Jon B. Alterman, *Dynamics Without Drama: New Options and Old Compromises in Egypt's Foreign Policy*, 362

<sup>79</sup> Hassan Ahmadian, *Egyptian Foreign Policy Identities*, 18

dilihat dari adanya kerjasama Mesir dan Israel dalam memblokade perbatasan Gaza.

#### 4. Muhammad Mursi

Muhammad Mursi adalah presiden pertama Mesir yang dipilih melalui pemilu demokratis. Mursi tidak menduduki kursi kepresidenan Mesir cukup lama akibat kudeta yang dilakukan militer Mesir. Ikhwanul Muslimin yang berada di belakang kepemimpinan Mursi dianggap membahayakan politik luar negeri Mesir yang sudah berjalan selama ini. Kedekatan Ikhwanul Muslimin dengan Hamas ditakutkan akan membahayakan keamanan nasional Mesir dan stabilitas kawasan.

Arah politik luar negeri Mursi lebih condong ke dalam kawasan Timur Tengah dan Afrika. Hal ini ditandai dengan kunjungan pertama Mursi sebagai presiden ke negara-negara seperti Etiopia, Arab Saudi, dan Iran. Selain itu Mursi juga mengunjungi Tiongkok di Asia sebagai tindakan nyata dari kebijakan Look East Mesir.<sup>80</sup> Kunjungan Mursi ke Tiongkok ditujukan untuk kerjasama pengembangan teknologi dan investasi asing.<sup>81</sup> Kemudian hubungan Mesir dengan Israel di bawah Mursi tetap berjalan karena keduanya mempunyai kepentingan keamanan yang sama di perbatasan Semenanjung Sinai. Tetapi dalam isu Israel-Palestina, Mursi lebih berpihak pada Palestina dalam hal ini Hamas. Mursi memberikan dukungannya kepada Hamas ketika terjadi *Operation Pillar of Defense* tahun 2012.<sup>82</sup>

### **B. Hubungan Mesir dengan Israel dan Amerika Serikat**

---

<sup>80</sup> Jannis Grimm dan Stephan Roll, *Egyptian Foreign Policy under Mohamed Morsi*, (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP Comments 35, November 2012), 1

<sup>81</sup> Hassan Ahmadian, *Egyptian Foreign Policy Identities*, 22

<sup>82</sup> Gregory Aftandilian, *Egypt's New Regime and the Future of the US-Egyptian Strategic Relationship*, (Strategic Studies Institute and US Army War College Press, April 2013), 21

Mesir adalah negara yang bertetangga dengan Israel dan mempunyai kekuatan yang besar di kawasan. Namun, Mesir juga pernah menjadi musuh besar bagi Israel. Lima perang telah terjadi antara kedua negara, Perang Kemerdekaan (1948-1949), Krisis Sinai (1956), Perang Enam Hari (1967), *War of Attrition* (1968-1970), dan yang terakhir adalah Perang Yom Kipur (1973).<sup>83</sup> Pada tahun 1979, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai Camp David. Meskipun hubungan keduanya mendapatkan protes dari sebagian negara kawasan Timur Tengah, namun Mesir dan Israel tetap menjaga perdamaian keduanya.

Mesir memberikan persyaratan jika ingin berdamai dengan Israel. Pertama, penetapan garis batas wilayah yang jelas dan pengembalian Aqaba kepada Mesir. Kedua, masalah Gaza dan pencari suakanya harus diselesaikan. Jika kedua persyaratan tersebut dipenuhi, maka Mesir akan melakukan perdamaian dengan Israel. Melalui perantara AS, Mesir dan Israel melakukan perjanjian damai. Perjanjian Camp David ini mengakhiri peperangan diantara Israel dan Mesir dan untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing. Israel menarik tentaranya dari Semenanjung Sinai. Setelah terjadinya demiliterisasi di Sinai, keduanya mendapatkan jaminan keamanan dari AS. Israel mendapatkan 3 juta dollar dan Mesir mendapatkan 1,3 juta dollar bantuan per tahun.<sup>84</sup>

Berdasarkan Perjanjian Damai, Israel diharuskan membeli minyak dan gas dari Mesir. Sebagai hasilnya, maka kedua negara membentuk kerjasama ekonomi. Sepanjang tahun 1994 hingga 2000, Israel mengekspor komoditasnya mencapai

---

<sup>83</sup> Harry Hurwitz dan Yisrael Medad, *Peace in the Making: The Menachem Begin-Anwar el Sadat Personal Correspondence*, (Jerusalem: Gefen Publishing House, 2011),.1

<sup>84</sup> Tami Amanda Jacoby. *Israel's Relations with Egypt and Turkey during the Arab Springs: Weathering the Storm*. (Israel Journal of Foreign Affairs VII, No. 2. 2013)

181 juta dollar ke Mesir. Sebaliknya, Mesir juga mengekspor gas, minyak, tekstil, sayuran, mesin, dan kapas ke Israel. Tahun 2005, Mesir dan Israel menandatangani kontrak sebesar 2,5 miliar dollar untuk mengekspor gas dari Mesir ke Israel. Mesir menyanggupi untuk mengirim 1,7 juta meter kubik gas selama periode 15 tahun ke Israel melalui pipa gas.<sup>85</sup> Selain kerjasama perdagangan, kedua negara juga mempunyai kerjasama dalam bidang pertanian berupa irigasi, produk vaksin hewan dan buah-buahan, dan penekanan pada lahan gersang.

Hubungan Mesir dan Israel yang berkembang juga meningkatkan sektor pariwisata kedua negara. Semenanjung Sinai merupakan situs yang terkenal bagi turis Israel terutama pada musim panas. Total kunjungan turis Israel ke Mesir mencapai 415.000 orang tahun 1999. Pasca revolusi Mesir 2011 kunjungan turis Israel ke Semenanjung Sinai menurun drastis dari 226.000 pengunjung pada 2010 menjadi 133.000 di tahun 2012. Namun pada 2014 hingga 2016 jumlah kunjungan berangsur-angsur meningkat.<sup>86</sup>

Pada tahun 2005, Mesir dan Israel menandatangani kerjasama keamanan untuk menempatkan 750 pasukan keamanannya di perbatasan Mesir dengan Gaza. Penempatan pasukan keamanan tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan senjata, manusia, narkoba, dan barang kebutuhan sehari-hari melalui terowongan-terowongan bawah tanah ke Gaza.<sup>87</sup> Mesir dan Israel juga menempatkan pasukan

---

<sup>85</sup> Arash Beidollah Khani. *Egyptian-Israel Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East*. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol 7, No. 3. 2013, 10

<sup>86</sup> Arash Beidollah Khani. *Egyptian-Israel Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East*., 10

<sup>87</sup> Arash Beidollah Khani. *Egyptian-Israel Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East*, 10

militernya di Sinai untuk mengatasi pemberontakan yang didanai oleh ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Israel memperbolehkan Mesir untuk menempatkan pasukannya di wilayah demiliterisasi Sinai.<sup>88</sup>

### C. Politik Luar Negeri Mesir Masa Kepemimpinan Al Sisi

Jenderal Abdel Fatah Al Sisi resmi menjabat sebagai presiden Mesir pada 8 Juni 2014. Al Sisi merupakan sosok yang tidak banyak diketahui publik hingga dia menjadi Menteri Pertahanan Mesir pada 12 Agustus 2012. Kemenangannya pada pemilihan presiden yang dilaksanakan bulan Mei tersebut tidaklah mengejutkan. Al Sisi mendapatkan dukungan masyarakat untuk menghapus rezim Ikhwanul Muslimin pada 30 Juni 2013 dari pemerintahan Mesir. Ikhwanul Muslimin dinyatakan ilegal dan dilarang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Al Sisi merupakan seorang yang sangat religious dan berasal dari keluarga yang Islami. Al Sisi merupakan tentara profesional yang mempunyai karir cemerlang di militer. Al Sisi berhasil menjadi anggota termuda *Supreme Council of the Armed Forces* (SCAF) yang diketahui mengisi kekosongan kekuatan pasca Mubarak turun dari jabatan. Sebagai presiden baru Mesir, Al Sisi mempunyai beberapa tantangan dalam membangun Mesir pasca kudeta dan membuat arah politik luar negeri Mesir yang baru.<sup>89</sup>

Al Sisi mengadopsi politik luar negeri yang aktif berlawanan dengan politik domestik. Al Sisi mengarahkan Mesir kepada negara Arab yang stabil yang

---

<sup>88</sup> Al Jazeera, Egypt-Israel relations 'at highest level' in history, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/egypt-israel-relations-highest-level-history-161107083926863.html> diakses pada 28 Juni 2017

<sup>89</sup> Abdel Monem Said Aly, Dechipering Abdel Fatah el Sisi: President of Egypt's Third Republic, (Crown Center for Middle East Studies, Middle East Brief No. 82, Juli 2014), 3

menghadapi tantangan yang sama dari revolusi *Arab Spring* dan Ikhwanul Muslimin. Al Sisi beraliansi dengan Arab Saudi, UEA, dan Kuwait untuk melawan kekuatan Ikhwanul Muslimin serta Hamas yang dianggap organisasi teroris di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Mesir juga menggantungkan ekonominya pada Arab Saudi dan UEA.<sup>90</sup>

Al Sisi juga mencari bantuan kepada AS dan Israel untuk menghancurkan terowongan-terowongan bawah tanah yang ada di Sinai dan Gaza serta mendesak isolasi Gaza lebih luas lagi. Selama *Operation Protective Edge* tahun 2014 antara Hamas dan Israel, pemerintah Mesir berlarut-larut dalam menengahi konflik tersebut. Pemerintahan Al Sisi melihat Hamas sebagai musuh yang harus diperangi di Mesir karena berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Normalisasi hubungan Mesir dengan AS juga menjadi salah satu fokus Al Sisi pasca jatuhnya Morsi. Al Sisi tahu bahwa AS tidak akan memotong bantuannya sebesar 1,3 juta dollar setiap tahun. Mesir meyakini bahwa AS membutuhkan Mesir di kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari kepentingan AS.<sup>91</sup>

Al Sisi berharap bahwa aliansinya yang kuat dengan negara-negara Teluk Arab dapat menekan AS dan negara Barat lainnya untuk mendukung rezim Al Sisi. Negara Teluk Arab telah memberikan subsidi dan pinjaman dalam jumlah besar. Al Sisi menyadari bahwa bantuan dari negara Teluk Arab hanya mampu bertahan beberapa bulan saja. Negara Teluk Arab juga menjelaskan pada Al Sisi bahwa bantuannya tidak dapat berlangsung selamanya. Maka dari itu, Mesir

---

<sup>90</sup> Housam Darwisheh, *Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt*, (IDE ME Review Vol. 2, 2014-2015), 55-56

<sup>91</sup> Housam Darwisheh, *Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt*, 63-64

mengajukan bantuan dan pinjaman dari institusi keuangan internasional seperti World Bank dan IMF. Untuk itu, Mesir memerlukan dukungan AS agar dapat menerima bantuan tersebut. Al Sisi juga ingin mempunyai hubungan yang stabil dengan Iran, sehingga menolak promosi anti-Syiah yang digencarkan Arab Saudi.<sup>92</sup>



#### **BAB IV**

### **ANALISA RESPON PEMERINTAH MESIR TERHADAP AGRESI ISRAEL KE JALUR GAZA TAHUN 2014**

Bab ini menganalisa respon pemerintah Mesir terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014 serta faktor-faktor yang dijadikan landasan dalam

---

<sup>92</sup> Housam Darwisheh, *Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt*, 56

menentukan respon Mesir pada masa kepemimpinan Abdel Fatah Al Sisi. Penulis akan menggunakan kerangka analisa kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, faktor eksternal serta faktor domestik, serta keamanan nasional.

#### **A. Respon Pemerintah Mesir Terhadap Agresi Israel ke Jalur Gaza Tahun 2014**

Pada 8 Juli 2014 Israel meluncurkan operasi militer ke Jalur Gaza. Operasi militer tersebut ditujukan Israel kepada Hamas sebagai balasan dari roket-roket dan misilnya yang diarahkan ke Israel. Sejak Hamas menguasai Jalur Gaza, operasi militer ini merupakan operasi militer ketiga yang diluncurkan Israel di Jalur Gaza. *Operation Protective Edge* merupakan eskalasi dari serangan-serangan roket Hamas selama beberapa bulan terakhir.

Mesir sebagai negara terdekat dengan Israel dan Palestina selalu berperan sebagai negosiator konflik kedua negara. Presiden Mubarak menginisiasi gencatan senjata pada *Operation Cast Lead* tahun 2008, sedangkan Morsi menjadi negosiator *Operation Pillar of Defense* tahun 2012. Posisi Mesir sebagai negosiator perdamaian Israel dan Palestina berawal pada tahun 1979. Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan di dalam perjanjian tersebut menyebutkan mengenai solusi dua negara Israel dan Palestina.

Pada operasi militer Israel di Gaza tahun 2014, Al Sisi tetap menjalankan tugasnya sebagai negosiator konflik. Kesempatan sebagai negosiator bagi Israel dan Hamas digunakan dengan baik oleh Al Sisi untuk mendapatkan perhatian AS dan negara Barat. Mesir menginisiasi gencatan senjata pada 14 Juli 2014. Israel menerima usulan tersebut, namun Hamas menolak. Penolakan Hamas tersebut



menyebabkan meluasnya kehancuran dan korban di Gaza. Mesir melakukan renegosiasi pada tanggal 27 Agustus 2014 setelah ada pembicaraan dengan pihak Hamas dan Otoritas Palestina. Akhirnya usulan penghentian gencatan senjata diterima oleh kedua pihak.<sup>93</sup>

Sikap politik luar negeri Mesir lebih banyak ditentukan dari kedekatan Mesir dengan negara-negara Barat, seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang menjadi dominan terhadap politik luar negeri Mesir. Namun di sisi lain Mesir sebagai negara terkuat di kawasan Timur Tengah diharapkan mampu menjadi penengah konflik yang tak kunjung usai di kawasan ini, khususnya konflik Israel-Palestina. Peran penting dan strategis Mesir terkait proses perdamaian di Timur Tengah tercermin dari konsultasi dan koordinasi yang dilakukan para pemimpin dunia dengan pihak Mesir.<sup>94</sup>

Pasca revolusi kondisi dalam negeri Mesir belum stabil sehingga Mesir menekankan prioritas utama pemulihan ekonomi yang merupakan sumber kebangkitan dan efektifnya sebuah pembangunan. Pemulihan ekonomi pasca revolusi membuat Mesir perlu bersikap cermat dan efektif terhadap tantangan yang ada serta dapat mempengaruhi sektor keamanan dan kedaulatan negara Mesir, khususnya tantangan yang datang dari eksternal agar konflik Israel-Palestina tidak mengganggu stabilitas Mesir sendiri.<sup>95</sup>

Mesir sebagai negara dominan di Timur Tengah mengutuk serangan Israel ke Jalur Gaza dan jatuhnya korban warga Gaza. Namun, respon Mesir tersebut

---

<sup>93</sup> Abdel Monem Said Aly, *Post-Revolution Egyptian Foreign Policy*, Crown Center for Middle East Studies No. 86, November 2014, 6

<sup>94</sup> Housam Darwisheh, *Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt*

<sup>95</sup> Housam Darwisheh, *Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt*

tidak diiringi dengan tindakan yang sama. Mesir tetap memblokade Jalur Gaza dengan menutup pintu Rafah untuk bantuan logistik, medis, dan untuk penyebrangan. Mesir hanya mengizinkan korban terluka melintasi perbatasan dan dirawat di rumah sakit di Mesir. Namun, pada akhirnya pemerintah Mesir mengizinkan bantuan logistik dan medis masuk melalui pintu perbatasan Rafah.<sup>96</sup>

Mesir merespon agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014 dengan pertimbangan melindungi keamanan dan keadulatan negaranya. Mesir dan Palestina memiliki sejarah panjang mengenai migrasi warganya. Hal ini disebabkan oleh adanya pergerakan penduduk dari Gaza ke Mesir. Pada masa pendudukan Israel di Palestina, penduduk yang berada di wilayah Jalur Gaza sudah banyak yang melakukan migrasi ke Mesir. Sebagian banyak dari mereka berstatus sebagai pengungsi. Para penduduk Gaza masuk ke Mesir melalui pintu Rafah yang menjadi salah satu dari pintu perbatasan antara Gaza dan Mesir. Para penduduk Jalur Gaza yang ingin memasuki wilayah Mesir tidak dapat dengan mudah keluar masuk perbatasan. Mereka harus melalui berbagai macam pemeriksaan.<sup>97</sup>

Pada masa kepemimpinan Hosni Mubarak, pemerintah Mesir memberlakukan pengontrolan dan pengawasan yang sangat ketat terhadap penduduk Gaza yang ingin memasuki wilayah Mesir. Selain itu, pemerintah Hosni Mubarak juga memberlakukan blokade terhadap Jalur Gaza melalui pintu Rafah dimana pintu tersebut ditutup total untuk segala aktifitas. Berbeda dengan masa

---

<sup>96</sup> The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Operation Protective Edge Update No. 19, 4 Agustus 2014

<sup>97</sup> Human Rights Watch, Humanitarian Impact of Operation Protective Edge in Gaza Strip. <https://www.acaps.org/country/palestine/special-reports> (Diakses 12 September 2016)

kepemimpinan Mursi di Mesir, pintu perbatasan Rafah dibuka dan penduduk Gaza diberikan kemudahan dan keleluasaan untuk keluar masuk dari dan ke Gaza. Hal ini terjadi karena Presiden Mursi merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin yang mempunyai hubungan baik dengan Hamas di Jalur Gaza.<sup>98</sup>

Kemudian pada masa Presiden Al Sisi, Mesir kembali membatasi pergerakan penduduk Gaza yang ingin memasuki Mesir. Pintu perbatasan Rafah seringkali ditutup dan diblokade oleh pihak keamanan Mesir. Alasan Mesir memblokade pintu Rafah karena Mesir melihat bahwa Hamas sebagai organisasi teroris dan mengancam keamanan nasional Mesir. Pihak intelijen Mesir melaporkan bahwa Hamas terlibat dalam serangan yang menewaskan sebanyak 33 penjaga keamanan Mesir di wilayah Sinai Utara. Keterlibatan Hamas dalam serangan tersebut terlihat dari diselundupkannya bahan peledak serta peluncurnya melalui terorongan-terowongan di Gaza. Selain itu, penolakan Hamas terhadap inisiasi gencatan senjata yang dilakukan Mesir juga menjadi faktor Mesir merespon demikian. Hamas justru berpaling ke Turki dan Qatar. Dan setelah ada negosiasi ulang antara Hamas dan Otoritas Palestina, Hamas setuju dengan inisiasi gencatan senjata tersebut.<sup>99</sup>

Karena kebijakan Mesir tersebut, banyak dari penduduk Gaza yang memprotesnya. Hal ini juga menimbulkan respon yang kurang baik dimana para penduduk Gaza yang ingin memasuki wilayah Mesir memilih untuk masuk dengan cara yang tidak sah atau ilegal yang tidak sesuai dengan prosedur

---

<sup>98</sup> Housam Darwisheh, *Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt*

<sup>99</sup> Yoni Ben Menachem, *Egyptian President al Sisi vs Hamas*, *Institutes for Contemporary Affairs* Vol. 14 No. 40, 4 Desember 2014 <http://jcpa.org/article/al-sisi-vs-hamas/> (diakses pada 9 Juli 2017)

keimigrasian Mesir. Para penduduk Gaza memilih memasuki Mesir melalui terowongan-terowongan bawah tanah yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir. Terowongan-terowongan tersebut juga menjadi satu-satunya jalan untuk membawa berbagai komoditas yang diperlukan di Jalur Gaza, termasuk juga adanya aktivitas penyelundupan senjata, imigran gelap, hingga aksi terorisme.<sup>100</sup>

Terowongan ini menjadi akses rahasia bagi penduduk di Jalur Gaza karena lebih mudah untuk melewati tanpa penjagaan karena tidak dijaga oleh pihak keamanan Mesir. Terowongan bawah tanah ini sudah ada dan beroperasi sejak tahun 1978 sejak Mesir menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel serta kembalinya Semenanjung Sinai ke tangan Mesir.<sup>101</sup> Penggalian terowongan bawah tanah di Jalur Gaza semakin meningkat pada tahun 2006-2007 ketika Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006. Israel dan Mesir semakin gencar memblokade Jalur Gaza. Seluruh jalur menuju Gaza baik darat, laut dan udara diblokade. Pemerintah Mesir pada saat itu khawatir dengan adanya terowongan-terowongan dari Jalur Gaza menuju Mesir karena hal tersebut mengancam keamanan nasional Mesir, khususnya di sekitar Semenanjung Sinai dan Rafah.<sup>102</sup>

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Respon Pemerintah Mesir terhadap Agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014**

### **1. Faktor Ideosinkretik**

Kebijakan luar negeri Mesir ditentukan oleh tujuan dari individu pemimpinnya. Setiap Mesir berganti kepemimpinan, maka tujuan kebijakan luar

---

<sup>100</sup> Arash Beidollah Khani. *Egyptian-Israel Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East*, 10

<sup>101</sup> Nicholas Pelham, *Gaza's Tunnel Phenomenon: The Unintended Dynamics of Israel's Siege*, *Journal of Palestines Studies*, Vol. XLI, 2011.

<sup>102</sup> Nicholas Pelham, *Gaza's Tunnel Phenomenon: The Unintended Dynamics of Israel's Siege*

negeri Mesir berganti juga. Sejak 1956 hingga 2014 Mesir mengalami pergantian pemimpin sebanyak lima kali. Gamal Abdel Nasser menjadi presiden hingga tahun 1970, kemudian digantikan oleh Anwar Sadat hingga tahun 1981, lalu Mesir dipimpin Hosni Mubarak hingga revolusi Arab Spring tahun 2011, kemudian Mohamad Morsi dan Abdel Fatah Al Sisi tahun 2014.

Beberapa dari presiden Mesir yang menjabat masing-masing mempunyai pengalaman dan berasal dari militer. Mereka mempunyai posisi yang tinggi setara dengan militer senior. Selain itu, setiap presiden Mesir juga mempunyai ciri khas kebijakan luar negerinya sendiri-sendiri yang berbeda dari kebijakan presiden Mesir satu sama lain. Penetapan kebijakan luar negeri Mesir ini berada pada pihak eksekutif yaitu presiden Mesir.<sup>103</sup> Seperti yang sudah dikatakan pada bab sebelumnya, kebijakan luar negeri Mesir tidak mempunyai dasar institusionalisme yang menyebabkan berubahnya kebijakan luar negeri Mesir setiap kali berganti presiden.

Presiden Nasser membawa identitas politik Mesir pada Arab, Islam, dan Afrika. Sejak Nasser muda, dia sudah memberontak melawan pemerintahan yang tidak adil. Nasser muda sering dipermalukan karena latar belakangnya yang merupakan rakyat jelata. Nasser bertekad untuk membuat orang-orang disekelilingnya bangga dan tidak malu untuk menjadi seorang Mesir. Nasser percaya bahwa Mesir dan bangsa Arab membutuhkan seseorang untuk memimpin dan melawan ketidakadilan dan imperialisme.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Andrew J. Stegall, *Egyptian Foreign Policy after the 25 January Revolution: What Next?*, Marine Corps University, 2012.

<sup>104</sup> Raymond Hinnebusch, *The International Politics of the Middle East Second Edition*, (Manchester University Press, 2015)

Di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser, Mesir mengalami masa kejayaannya. Nasser menjadi pemimpin yang dicintai dan sangat dihormati berkat usahanya mengakhiri kolonialisme Inggris yang telah berada di Mesir selama hampir 70 tahun.<sup>105</sup> Selain itu, Nasser juga membawa Mesir pada peran vital seperti memimpin Gerakan Non Blok (GNB), mendukung pergerakan kemerdekaan negara-negara di Arab dan Afrika, mendukung berdirinya Liga Arab pada tahun 1945, dan memperjuangkan masalah Palestina. Mesir juga berperan dalam menyebarkan paham Pan Arabisme di kawasan Timur Tengah dimana tidak hanya berpengaruh bagi kebijakan luar negeri Mesir, tetapi juga negara-negara Arab lainnya. Mesir juga mengikuti Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dalam langkahnya mendukung kemerdekaan Palestina.

Setelah Presiden Sadat menjadi presiden Mesir berikutnya, perlahan-lahan Mesir berubah haluan dengan lebih mendukung Israel. Hal ini terlihat dengan pertemuan-pertemuan rahasia Anwar Sadat dengan pihak Israel dan juga diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Damai. Sadat merupakan presiden Mesir yang suka menyendiri dan berpikir sendiri dalam mengambil keputusan. Pada pertemuan pertamanya dengan Presiden AS, Henry Kissinger, Sadat mendeklarasikan bahwa Mesir telah berhenti berhubungan dengan Uni Soviet dan Mesir telah menghentikan perang dengan Israel. Sadat memberitahu Menteri Pertahanan Israel, Ezer Weizman, bahwa Mesir akan membuat perdamaian dengan Israel, tidak peduli Israel mengakui negara Palestina atau tidak.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Jamie Stokes, *Encyclopedia of The Peoples of Africa and The Middle East*, New York: Facts On File, Inc., 2008), h.205

<sup>106</sup> Raymond Hinnebusch, *The International Politics of the Middle East Second Edition*

Penandatanganan Perjanjian Damai dengan Israel dan protes besar-besaran dunia Arab tersebut membawa Sadat pada akhir masa hidupnya. Sadat dibunuh oleh sebuah kelompok jihad Islam yang berbasis di Mesir pada tanggal 6 Oktober 1981.<sup>107</sup> Setelah kematian Anwar Sadat, Hosni Mubarak yang merupakan wakil presiden Mesir pada saat itu dilantik pada tahun yang sama. Mubarak memimpin Mesir selama 32 tahun di bawah kepemimpinannya yang otoriter. Di bawah kepemimpinan Mubarak, Mesir mempunyai dua agenda yaitu kembali berhubungan dengan bangsa Arab dan juga melanjutkan hubungan damai dengan Israel.

Pasca *Arab Spring*, Mesir dipimpin oleh presiden yang berlatar belakang Islamis yaitu Mohammad Morsi dari Ikhwanul Muslimin. Kebijakan luar negeri yang diambil Morsi lebih cenderung mementingkan kawasan Timur Tengah dan menyambung hubungan dengan negara Arab dan Asia seperti Tiongkok. Kemudian Morsi dikudeta oleh militer Mesir. Pasca kudeta Mursi, Al Sisi memenangkan pemilihan presiden Mesir dan resmi menjabat tahun 2014. Al Sisi berasal dari latar belakang militer dimana sebelumnya Al Sisi merupakan Menteri Pertahanan Mesir pada masa Morsi.

## **2. Aliansi**

Mesir merupakan salah satu negara yang penting di kawasan Timur Tengah dan Arab. Sebagai salah satu negara terbesar di kawasan, Mesir mempunyai peran yang penting bagi perkembangan kawasan Timur Tengah. Sejak Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel tahun 1979, kedua negara tidak

---

<sup>107</sup> AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee). After 35 Years, Israel-Egypt Treaty Marks Key Benchmark for Middle East Peace. Washington D.C., March 2014.

hanya terlibat dalam kerjasama strategis namun juga ada kerjasama lain seperti kerjasama perdagangan, kebudayaan, turisme, dan pertanian. Selain itu, perjanjian damai juga diikuti oleh munculnya misi diplomatik di kedua negara.<sup>108</sup>

Mesir dan Israel merupakan negara tetangga secara lokasi geografis. Keduanya juga mempunyai kepentingan yang sama dalam beberapa hal seperti misalnya konflik Israel dan Palestina. Keduanya mempunyai pandangan yang sama terhadap Hamas yang menguasai Gaza. Selain itu, pasca ditandatanganinya perjanjian damai antara Israel dan Mesir, Mesir telah menerima bantuan militer dari Amerika Serikat sebanyak 1,3 miliar dollar.<sup>109</sup> Negara terbesar kedua yang diberikan bantuan militer oleh Amerika Serikat setelah sekutunya, Israel.<sup>110</sup>

Bantuan militer dari Amerika Serikat tersebut berupa pembaharuan perlengkapan militer Mesir, pengadaan suku cadang, biaya pemeliharaan peralatan militer baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang, termasuk juga penyewaan penasihat asing. Berdasarkan *US Government's Foreign Assistance Report* yang dikeluarkan November 2015, Israel dan Mesir secara kolektif menerima 75% dari 5,9 miliar dollar bantuan militer luar negeri yang diberikan oleh pemerintah AS selama beberapa tahun. Israel menerima 3,1 miliar dollar, sedangkan Mesir menerima 1,3 miliar dollar.

#### **Gambar IV.1 Bantuan Amerika Serikat ke Mesir 2011-2017**

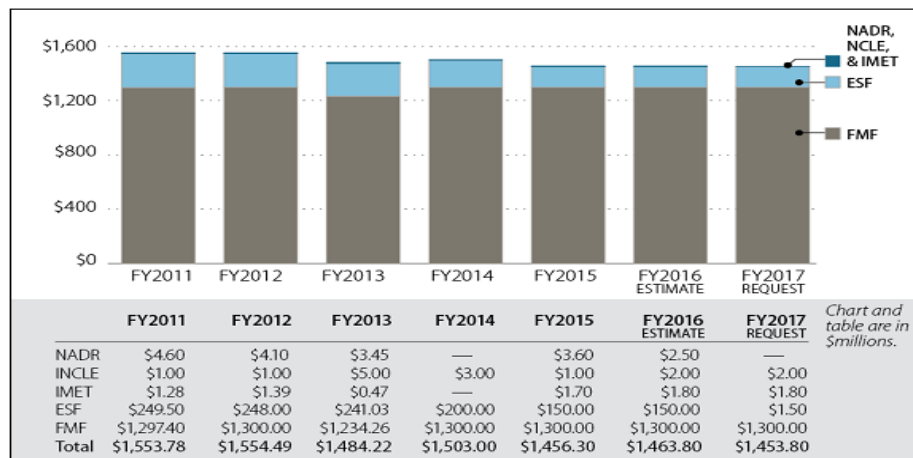
---

<sup>108</sup> Abdel Monem Said Aly and Shai Feldman, *Testing the Resilience of Egyptian-Israeli Peace*, Crown Center for Middle East Studies No. 56, November 2011, 2

<sup>109</sup> Tami Amanda Jacoby. *Israel's Relations with Egypt and Turkey during the Arab Springs: Weathering the Storm*.

<sup>110</sup> Duncan L. Clarke. *US Security Assistance to Egypt and Israel: Politically Untouchable?*. Vol 51, No 2 (Spring, 1997). Published by: Middle East Institute.





Sumber: US State Department<sup>111</sup>

Sejak Mubarak menjadi presiden Mesir, hubungan kerjasama keduanya berjalan semakin baik. Mesir dan Israel tidak hanya mempunyai kerjasama di bidang strategis, tetapi juga di bidang ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan kesepakatan ekspor 2,5 miliar dollar dengan Israel yang ditandatangani tahun 2005, Israel mendapat pasokan gas alam dari Mesir sebanyak 40%, dan menunjukkan bahwa Mesir adalah pemasok utama gas alam ke Israel.<sup>112</sup> Selain itu data dari statistik Israel melaporkan bahwa hubungan bilateral antara Mesir dan Israel di bidang perdagangan mencapai 502 juta dollar. Impor dari Mesir sebanyak 355 juta dollar dan ekspor ke Israel sebanyak 147 juta dollar.<sup>113</sup>

Hubungan Mesir dan Israel meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dalam bidang keamanan. Fenomena *Arab Spring* dan revolusi Mesir telah berkontribusi pada hubungan yang lebih dekat antara pemimpin kedua negara. Ketika militer menjatuhkan pemerintahan Mursi, Al Sisi menjadi presiden Mesir dan hubungan kedua negara menjadi semakin kuat. Pada awal 2016, Mesir

<sup>111</sup> US State Department, Congressional Budget Justification, <https://www.state.gov/documents/organization/252179.pdf> (Diakses pada 29 Mei 2017)

<sup>112</sup> Arash Beidollah Khani. *Egyptian-Israel Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East.*, 10

<sup>113</sup> The Global Review, Menelusik Hubungan Mesir dan Israel Sepanjang Sejarah, [http://theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=5869&type=2](http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=5869&type=2) (Diakses 29 Mei 2017)

menunjuk duta besar Mesir di Tel Aviv dan membuka kembali kedutaan besar Israel di Kairo untuk pertama kalinya sejak 2012. Baik Mesir dan Israel keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan dari adanya perjanjian damai Camp David.

Aliansi antara Mesir dan Israel lebih banyak cenderung pada bidang militer dan kerjasama keamanan. Hal ini terutama dengan adanya kelompok-kelompok teroris jihadis di Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai. Keduanya bekerjasama untuk dapat menaklukkan pemberontakan kelompok-kelompok jihadis tersebut. Bahkan Israel mengizinkan untuk membawa pasukan militernya dengan persenjataan yang lengkap melewati batas demiliterisasi area tersebut berdasarkan perjanjian damai. Selain itu, Mesir dan Israel memiliki pandangan yang sama terhadap Hamas yang menduduki Jalur Gaza. Mesir menganggap bahwa Hamas terhubung dengan opisisi militer Mesir, Ikhwanul Muslimin, sedangkan di pihak lain Israel menganggap bahwa Hamas mengancam kedaulatan Israel.

Sejak Sisi menjabat sebagai Presiden di 2014, pemerintah Mesir selalu menutup pintu penyebrangan Rafah dan perbatasan Sinai. Selain bekerjasama dalam memblokade perbatasan dan Jalur Gaza, kedua negara juga melakukan penghancuran terowongan-terowongan yang menghubungkan Sinai dan Gaza. Terowongan-terowongan tersebut digunakan untuk menyelundupkan orang keluar dan masuk dan untuk penyelundupan senjata.

### **3. Kepentingan Ekonomi**

Mesir merupakan negara kedua terbesar yang terletak di wilayah Afrika Utara setelah Arab Saudi dan merupakan negara dengan tingkat perekonomian sedang beekembang. Dengan pendapatan perkapitanya yang hanya sebesar 1310

dollar pertahun membuat Mesir menjadi salah satu negara yang termiskin di Afrika Utara.<sup>114</sup> Wilayah geografisnya yang dipenuhi gurun, hanya memungkinkan untuk diadakan industri pertanian di daerah lembah Sungai Nil saja. Selain itu juga banyaknya penduduk yang nomaden, membuat ketimpangan ekonomi semakin nyata di Mesir.

Sumber pendapatan ekonomi Mesir hanya dari sektor pariwisata, pajak melewati Terusan Suez, penerimaan devisa dari tenaga kerjanya yang di luar negeri, dan yang paling terbesar adalah dari impor gas alam yaitu sebanyak 35%. Dalam bidang perdagangan, Mesir sangat bergantung kepada Israel dan AS. Salah satu komoditi impor Mesir ke Israel yaitu gas alam. Pasokan gas alam Mesir untuk Israel merupakan komoditi ekonomi utama sejak perjanjian Camp David tahun 1979.

Dengan besarnya hasil ekonomi Mesir dari perdagangan dengan Israel membuat pemerintah Mesir yang membuat kebijakan tentunya tidak ingin melepaskan hubungan perdagangan yang sudah berjalan baik ini. AS yang hubungannya sangat dekat dengan Israel dan juga merupakan aliansi terdekat Mesir tentunya juga akan menghentikan segala bantuan ekonominya ke Mesir jika Mesir lebih berpihak kepada Palestina.

Mesir juga merupakan negara yang sedang berkembang dalam ekonomi, sehingga kesempatan untuk melakukan perdagangan dengan Negara-negara maju apalagi seperti Amerika Serikat tidak akan disia-siakan. Selain adanya hubungan ekonomi dengan Israel dan AS, Mesir juga diberikan sumbangan pendidikan yang

---

<sup>114</sup> OECD, African Economic Outlook, 2013 <https://www.oecd.org/countries/egypt/> (diakses pada 29 Mei 2017)

sangat besar oleh Amerika Serikat. Adanya pertukaran pelajar Mesir dan Amerika Serikat atau beasiswa yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada siswa Mesir yang berprestasi tentunya akan membawa keuntungan bagi Mesir.

Sejak Perjanjian Damai 1979, Mesir dan Israel melakukan kerjasama perdagangan sebesar 40 juta dollar sampai 50 juta dollar per tahunnya. Kemudian dari tahun 1993 hingga 2000, volume perdagangan kedua negara meningkat menjadi 181 juta dollar per tahun. Peningkatan volume perdagangan ini diketahui setelah penandatanganan Oslo Accords. Komoditi yang diperdagangkan yaitu minyak, gas alam, dan produk pertanian seperti bahan kimia dan pupuk. Pada tahun 2004, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian *Qualifying Industrial Zones* (QIZ). Perjanjian ini diinisiasi oleh AS dimana Mesir boleh mengirimkan barang-barang ekspor dari negaranya bebas biaya masuk.<sup>115</sup>

Pada tahun 2004, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian *Qualifying Industrial Zones* (QIZ). Perjanjian ini diinisiasi oleh AS dimana Mesir boleh mengirimkan barang-barang ekspor dari negaranya bebas biaya masuk. Pada tahun 2008, volume perdagangan keduanya meningkat sebesar 270 juta dollar dari hasil penjualan gas alam. Dan pada 2010, peningkatan perdagangan mencapai hampir 500 juta dollar. Namun, sejak Mubarak diturunkan dari kursi presiden, hubungan antara Israel dan Mesir mengalami penurunan menjadi 415 juta dollar dan pada 2013 hanya mencapai 200 juta dollar.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Arash Beidollah Khani. *Egyptian-Israel Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East.*, 10

<sup>116</sup> Arash Beidollah Khani. *Egyptian-Israel Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East.*, 10

Selain kerjasama ekonomi dengan Israel, Mesir juga mendapatkan keuntungan dari AS karena menandatangani Perjanjian Damai 1979. Pada tahun 1994, Wakil Presiden Amerika Serikat saat itu, Al Gore dan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak membentuk *U.S.-Egypt Partnership for Economic Growth*, sebuah forum bilateral yang didesain untuk mendorong sektor swasta Mesir dan mempromosikan perdagangan antara Amerika Serikat dan Mesir. Pemerintah Mesir berharap bahwa tingginya perhatian Amerika Serikat pada isu-isu ekonomi bilateral pada akhirnya akan berujung pada kemungkinan tercapainya perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.<sup>117</sup>

Pada tahun fiskal 2008, kongres Amerika Serikat mengurangi bantuan ESF untuk Mesir dari 815 juta dollar pada tahun fiskal 1998 menjadi 411 juta dollar. Pemerintahan Presiden Bush, yang hubungannya dengan Presiden Mesir saat itu Hosni Mubarak memburuk akibat reaksi Mubarak pada agenda demokrasi Amerika Serikat di dunia Arab, meminta kepada kongres untuk memotong bantuan ESF menjadi setengahnya pada tahun fiskal 2009 menjadi hanya 200 juta dollar. Kongres kemudian menyesuaikan dengan permintaan Presiden Bush.

Saat mulai menjabat pada tahun 2009, Presiden Obama meminta tambahan 50 juta dollar dalam bantuan ekonomi untuk Mesir pada tahun fiskal 2010, dan kongres menerimanya. Dari tahun 2010 sampai 2013, Amerika Serikat memberikan dana ESF kepada Mesir sebesar 250 juta dollar, tahun 2014 200 juta

---

<sup>117</sup> Jeremy M. Sharp, *Egypt: Background and US Relations*, (Congressional Research Service, 12 Agustus 2008)

dollar, dan pada tahun 2015 sebesar 150 juta dollar, yang mana tidak kurang dari 35 juta dollar dikhususkan untuk program pendidikan tinggi dan beasiswa.<sup>118</sup>

Pada akhir tahun 2011, kongres Amerika Serikat mengesahkan P.L. 112-74, Undang-Undang Pemberian Terkonsolidasi, yang memberikan otorisasi atas pembentukan dana usaha untuk Mesir, Jordan, dan Tunisia. Tujuannya adalah untuk mendorong lebih jauh sektor swasta Mesir, terutama di bidang agrikultur, dengan melakukan investasi pada industri skala kecil-menengah atau memberikan pinjaman modal awal dan bantuan teknis kepada pengusaha. Pada tahun 2012, dana usaha Mesir-Amerika Serikat (*The Egyptian-American Enterprise Fund/EAEF*) didirikan secara formal di Delaware.<sup>119</sup>

Kepentingan ekonomi Mesir dengan Amerika Serikat dan Israel tidak hanya terkait bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Mesir, namun juga dari perdagangan antar kedua negara. Hubungan perdagangan dan investasi Mesir dengan Amerika Serikat terus menguat selama lebih dari 30 tahun terakhir semenjak Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Sejak saat itu, kedua negara telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan mereka, terutama melalui berbagai kemitraan dan kesepakatan. Setiap tahun, Mesir meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat. Ekspor Mesir ke Amerika Serikat bernilai 1 miliar dollar atau 4,5% dari keseluruhan nilai ekspor Mesir.<sup>120</sup>

#### **4. Keamanan**

---

<sup>118</sup> Jeremy M. Sharp, *Egypt: Background and US Relations*

<sup>119</sup> Government Public Officer, Public Law 112-74, <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ74/html/PLAW-112publ74.htm>

<sup>120</sup> Jeremy M. Sharp, *Egypt: Background and US Relations*

Ancaman terhadap keamanan nasional Mesir semakin meningkat dengan adanya serangkaian kejadian yang mengancam perkembangan kawasan seperti adanya situasi yang memburuk di Irak dan Suriah serta adanya ancaman terorisme di kawasan Semenanjung Sinai di Mesir. Kawasan Timur Tengah memang dikenal dengan negara-negara dimana kelompok teroris berasal. Permasalahan terorisme sendiri tidak hanya menjadi ancaman bagi satu negara saja, namun juga dapat menyebar dan mempengaruhi negara lainnya yang berada di sekitarnya.

Revolusi terhadap rezim presiden Mubarak di Mesir tahun 2011 menimbulkan adanya peningkatan aktivitas terorisme di kawasan Semenanjung Sinai. Hingga beberapa tahun ke depan, Sinai terus mengalami adanya penurunan tingkat keamanan dimana polisi dan petugas keamanan militer harus menghadapi serangan dari kelompok teroris di Sinai. Setelah presiden Mursi turun dari kursi kepemimpinan di Mesir, serangan teror di Sinai semakin meningkat. Sinai kini dijadikan sebagai tempat untuk melancarkan serangan teror oleh kelompok teroris ke wilayah Mesir dan Israel.<sup>121</sup>

Sinai sudah menjadi titik fokus masalah politik dan keamanan Mesir selama lebih dari empat dekade. Setelah dikuasai oleh Israel pada Perang Arab-Israel tahun 1967 dan dikembalikan lagi kepada Mesir dengan adanya Perjanjian Damai Mesir dan Israel tahun 1979, Semenanjung Sinai menjadi pusat ketegangan kedua negara. Meskipun kedua negara setuju untuk melakukan demiliterisasi kawasan Sinai, namun tetap saja kawasan ini menjadi sangat tersekritisasi dengan hadirnya pasukan polisi dan pasukan militer Mesir. Terlebih lagi wilayah Sinai

---

<sup>121</sup> Zack Gold, Security in the Sinai: Present and Future, ICCT Research Paper, Maret 2014, 1

yang terpencil dan dengan medan yang sulit menawarkan lokasi yang strategis bagi kejahatan seperti penyelundupan manusia, narkoba, dan penyelundupan senjata, dan bagi kelompok teroris untuk melatih dan melancarkan serangan teror baik ke Mesir maupun Israel.<sup>122</sup>

Sejak Juli 2013 hingga Agustus 2015, pemerintah Mesir menghancurkan setidaknya 3.255 rumah penduduk, gedung komersial dan bisnis, serta gedung pelayanan masyarakat di sepanjang Sinai yang berbatasan dengan Jalur Gaza. Selain itu pemerintah Mesir meratakan sekitar 685 hektar lahan pertanian dan perkebunan juga. Hal ini dilakukan secara matang dalam rangka pembentukan zona penyangga dengan Jalur Gaza. Penghancuran tersebut terwujud setelah pada tanggal 24 Oktober 2014, kelompok teroris yang berada di Sinai, Ansar Baitul Maqdis (ABM) melakukan serangan teror ke pos penjagaan militer Mesir di Sinai Utara dan dilaporkan menewaskan 30 tentara Mesir. ABM sendiri diketahui merupakan kelompok jihad yang sudah melakukan ikrar setia pada kelompok ekstrimis ISIS.<sup>123</sup>

Presiden Al Sisi setelah serangan tersebut menyatakan bahwa Mesir berada dalam masa darurat selama tiga bulan di seluruh kawasan Sinai Utara. 5 hari kemudian, Perdana Menteri, Ibrahim Mehleb, mengeluarkan dekrit yang memerintahkan isolasi dan evakuasi 79 km wilayah dari perbatasan Gaza dan Sinai. zona penyangga tersebut mencakup seluruh Rafah, kota yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza dan Sinai Utara. Pemerintah Mesir membenarkan bahwa zona penyangga tersebut sebagai cara untuk meredam pemberontakan

---

<sup>122</sup> Zack Gold, *Security in the Sinai: Present and Future*, 2

<sup>123</sup> Shaul Shay, *Egypt's War against the Tunnels between Sinai and Gaza Strip*, IPS Publications, January 2016, 6



dengan cara menghancurkan terowongan yang biasa dipakai oleh jihadis militan membawa para jihadis dan senjata untuk dikirim dari Gaza ke Sinai.<sup>124</sup>

Selain menyerang penjaga keamanan dan militer Mesir, para teroris tersebut juga menyerang pipa gas yang berada di Sinai. Pipa gas tersebut menuju ke kawasan industri Mesir, Yordania, dan Israel. Serangan juga ditujukan kepada warga sipil dan turis. Kelompok teroris menyerang sebuah bus yang membawa turis dari Korea Selatan dan menewaskan supir bus dan tiga turis Korea Selatan di Taba pada Februari 2014.<sup>125</sup>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Skripsi ini menjelaskan tentang respon pemerintah Mesir terhadap Agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014. Skripsi ini membuat pertanyaan masalah: *“Mengapa pemerintahan Al Sisi mengeluarkan respon yang lebih menguntungkan Israel pada agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2014? Respon pemerintah Mesir terhadap agresi tersebut menyesuaikan pada kepentingan nasional Mesir. Skripsi ini menyimpulkan beberapa poin berdasarkan analisa-analisa pada bab-bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:*

1. Agresi Israel ke Jalur Gaza selalu menimbulkan dampak yang mematikan terhadap kondisi penduduk Gaza. Serangan yang diluncurkan untuk membalas roket-roket pejuang Hamas kearah Israel selalu dibalas dengan

<sup>124</sup> Shaul Shay, *Egypt's War against the Tunnels between Sinai and Gaza Strip*, 3

<sup>125</sup> Shaul Shay, *Egypt's War against the Tunnels between Sinai and Gaza Strip*, 3

lebih besar dan lebih merusak dibandingkan dengan roket-roket skala ledak kecil mereka. Dampak dari agresi Israel tersebut cukup besar dan menimbulkan kerusakan yang permanen. Selain banyaknya jumlah korban tewas dan terluka yang terdiri dari warga sipil, agresi ini juga menimbulkan adanya konflik sosial dan psikologis. Penduduk kehilangan tempat tinggal, bangunan sekolah hancur, dan lahan pertanian rusak parah karena dibombardir.

2. Hubungan Mesir dan Israel mengalami dinamika naik dan turun berdasarkan siapa yang memimpin Mesir. Pada masa kepemimpinan Nasser, Mesir sangat bermusuhan dengan Israel. Namun sejak Anwar Sadat dan Hosni Mubarak memimpin Mesir, hubungan Mesir dan Israel menjadi sangat harmonis dan Mesir juga melakukan perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979.
3. Respon pemerintah Mesir yang memblokir Jalur Gaza dan menghancurkan terowongan-terowongan bawah tanah dari Gaza menuju Mesir dan Sinai berdasarkan situasi keamanan nasional Mesir, serta melakukan pelarangan terhadap Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Banyak pengungsi dari Gaza yang pada akhirnya menetap di Mesir dan menjadi imigran ilegal karena tidak mempunyai izin tinggal. Selain itu dengan adanya terowongan-terowongan tersebut sering terjadinya penyelundupan manusia, barang kebutuhan, dan yang terburuk adalah penyelundupan narkoba dan senjata untuk menyenjatai para kelompok jihadis terorisme yang berdiam di Semenanjung Sinai.

4. Mesir dan Israel melakukan aliansi dan kerjasama ekonomi, perdagangan, serta kerjasama keamanan untuk memerangi terorisme di Semenanjung Sinai. Keduanya bekerjasama karena kelompok teroris di wilayah Sinai menargetkan Israel dan penjaga keamanan Mesir. Israel mengizinkan Mesir untuk membawa pasukan lebih serta senjata dan tank-tank di perbatasan Israel-Sinai padahal kawasan tersebut adalah zona demiliterisasi. Hal ini dilakukan agar keamanan dapat tercipta di kedua negara.

#### **B. Kelemahan**

Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dalam mencari dan menjelaskan data-data. Selain itu, penulis tidak melakukan wawancara kepada pihak yang ahli dan hanya menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel di internet. Penelitian ini hanya memiliki jangka waktu tahun 2014 ke bawah sehingga tidak menjelaskan kejadian pada tahun-tahun berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Alex Mintz and Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*. (New York: Cambridge University Press, New York)
- Anthony, Mely Calballero. 2016. *An Introduction to Non-Traditional Security Studies (A Transnational Approach)*. London : Sage Publications Ltd.
- Coulumbis, A. Theodore dan James H. Wolfe. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Bandung: Putra A Bardin.
- Edwards, Beverly Milton. 2009. *The Israeli-Palestinian Conflict: A People's War*. New York: Routledge.
- Frankel, J. 1970. *National Interest*. London: MacMillan.
- Holsti, K. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: A Simon and Shuster Company.
- Hurwitz, Harry dan Yisrael Medad. 2011. *Peace in the Making: The Menachem Begin-Anwar el Sadat Personal Correspondence*. Jerusalem: Gefen Publishing House.
- Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abaridin.
- Kennan, George. 1954. *Realities of American Foreign Policy* dalam Scott Burchill, *Theories of International Relations*, Princeton
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

- Maso' oed, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada
- Morgenthau, Hans J. 1960. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Knopf.
- Hinnebusch Raymond. 2015. *The International Politics of the Middle East Second Edition*. Manchester: Manchester University Press.
- Rosenau, J.N, 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York : The Free Press.
- Rosenau, James N. 2006. *The Study of World Politics*. New York : Routledge.
- Sihbudi, Reza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Mizan.
- Stokes, Jamie. 2008. *Encyclopedia of The Peoples of Africa and The Middle East*. New York: Facts On File, Inc.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tahqiq, Nanang. 2004. *Politik Islam*. Jakarta : Kencana.

#### **Artikel dan Jurnal**

- Aftandilian, Gregory. 2013. *Egypt's New Regime and the Future of the US-Egyptian Strategic Relationship*. Strategic Studies Institute and US Army War College Press.
- Ahmadian, Hassan. 2014. *Egyptian Foreign Policy Identities*. Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 5 No. 3.



- AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee). 2014. *After 35 Years, Israel-Egypt Treaty Marks Key Benchmark for Middle East Peace*. Washington D.C.
- Alterman, Jon B. 2005. *Dynamics Without Drama: New Options and Old Compromises in Egypt's Foreign Policy*. Cambridge Review of International Affairs, Vol 18 No. 3.
- Aly, Abdel Monem Said. 2014. *Dechipering Abdel Fatah el Sisi: President of Egypt's Third Republic*. Crown Center for Middle East Studies, Middle East Brief No. 82.
- Amnesty International. 2009. *Israel/Gaza Operation 'Cast Lead': 22 Days of Death and Destruction*. United Kingdom: Amnesty International Publishing.
- Bayeh, Endalcachew. 2016. *The Current War on Gaza: A Challenge to the Principle of the Responsibility to Protect*. Global Journal of Political Science and Administration, Vol. 4, No. 2.
- Beinin, Joel dan Lisa Hajjar. 2014. *Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict*. The Middle East Research and Information Project (MERIP).
- Buzan, Barry. 1988. *The Southeast Asian Security Complex dalam Contemporary Southeast Asia* Vol. 10, No. 1.
- Chorew, Harel. 2014. *The Road to Operation Protective Edge: Gaps in Strategic Perception*. Israel Journal of Foreign Affairs VIII:5.
- Clarke, Duncan L. 1997. *US Security Assistance to Egypt and Israel: Politically Untouchable?*. Middle East Institute: Spring, Vol 51, No 2.
- Darwisheh, Housam. 2014-2015. *Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt*. IDE ME Review Vol. 2.
- Gold Zack. 2014. *Security in the Sinai: Present and Future*, ICCT Research Paper
- Grimm, Jannis dan Stephan Roll. 2012. *Egyptian Foreign Policy under Mohamed Morsi*. Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP Comments 35.
- Hanoun, Beit. 2014. *Trapped and Punished: The Gaza Civilian Population under Operation Protective Edge*. FIDH Field Mission.
- Jacoby, Tami Amanda. 2013. *Israel's Relations with Egypt and Turkey during the Arab Springs: Weathering the Storm*. Israel Journal of Foreign Affairs VII, No. 2.
- Khani, Arash Beidollah. 2013. *Egyptian-Israel Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East*. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol 7, No. 3.
- Menachem, Yoni Ben. 2014. *Egyptian President al Sisi vs Hamas*. Institutes for Contemporary Affairs Vol. 14 No. 40
- Meringolo, Azzura. 2015. *From Morsi to Al Sisi: Foreign Policy at the Service of Domestic Policy*. Istituto Affari Internazionali, Insight Egypt No. 8.
- Migdalovitz, Carol. 2010. *Israeli-Arab Negotiations: Background, Conflicts, and U.S. Policy*. Congressional Research Service.
- Nafaa, Hassan. 2010. *Egypt's Foreign Policy: Challenges and prospects for correction*. Al Jazeera Centre for Studies.

- Pelham, Nicholas. 2011. *Gaza's Tunnel Phenomenon: The Unintended Dynamics of Israel's Siege*. Journal of Palestines Studies, Vol. XLI.
- Said, Mohamed Kadry. 2006. *Egypt's Foreign Policy in Global Change: The Egyptian Role in Regional and International Politics*. FES Briefing Paper.
- Said, Aly Abdel Monem. 2014. *Dechipering Abdel Fatah el Sisi: President of Egypt's Third Republic*. Crown Center for Middle East Studies, Middle East Brief No. 82
- Said, Aly Abdel Monem. 2014. *Post-Revoution Egyptian Foreign Policy*. Crown Center for Middle East Studies, Middle East Brief No. 86.
- Said, Aly Abdel Monem dan Shai Feldman. 2011. Testing the Resilience of Egyptian-Israeli Peace. Crown Center for Middle East Studies No. 56
- Shay Shaul. 2016. *Egypt's War against the Tunnels between Sinai and Gaza Strip*. IPS Publications.
- Shamir, Eitan. 2015. *The 2014 Gaza War: Rethinking Operation Protective Edge*. Middle East Quarterly, Spring.
- Sharp, Jeremy M. 2009. *Egypt: Background and U.S. Relations*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Stegall, Andrew J. 2012. *Egyptian Foreign Policy after the 25 January Revolution: What Next?* Marine Corps University.
- Stein, Yael. 2013. *Human Rights Violation during Operation Pillar of Defense*. B'tselem.
- The Meir Amit Intelligene and Terrorism Information Center, Operation Protective Edge Update No. 19, 4 Agustus 2014
- Tianshe, Chen. 2011. *Four Points toward the Understanding of Egypt's Foreign Relations*. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies in Asia, Vol. 5, No. 1.
- UNOCHA. 2014. *Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report*.
- Wang, Jing. 2006. *An Analysis of Egypt's Foreign Policy*. West Asia and Africa, No. 4.
- Yashiv, Eran. 2014. *Operation Protective Edge: Economy Summary*. Institute for National Security Studies.
- Zanotti, Jim. 2009. *Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008-2009)*. Congressional Research Service.

### Website

- ACAPS. 2014. *Humanitarian Impact of Operation Protective Edge in Gaza Strip*. <https://www.acaps.org/country/palestine/special-reports>. 12 September 2016.
- ACAPS. 2014. *Humanitarian Response Plan January-December 2016. Occupied Palestinian Teritory*. [https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/2016\\_hrp\\_22\\_january\\_2016.pdf](https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/2016_hrp_22_january_2016.pdf). 12 September 2016.
- Agencies. 2012. *Update: Egypt Closes Rafah Crossing*. <http://www.egyptindependent.com/news/update-egypt-closes-rafah-crossing>. 1 September 2016.

- Al Jazeera. 2016. *Egypt-Israel Relations 'At Highest Level' in History*, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/egypt-israel-relations-highest-level-history-161107083926863.html> 28 Juni 2017.
- BBC, Serangan Israel ke sekolah PBB di Gaza. [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140730\\_gaza](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140730_gaza) (Diakses pada 14 September 2016)
- Central Bureau of Statistics Israel, *Israeli Settlements*, [http://www.cbs.gov.il/reader/cw\\_usr\\_view\\_folder?ID=141](http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_folder?ID=141) (Diakses pada 3 Juni 2017)
- Defense for Children International Palestine. Annual Reports 2014. [https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci\\_report\\_2015\\_english\\_small.pdf?1435333791/](https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791/) (Diakses pada 12 September)
- Egypt Independent, Update: Egypt Closes Rafah Crossing, <http://www.egyptindependent.com/news/update-egypt-closes-rafah-crossing>, (diakses 1 September 2016)
- Gaza Emergency Situation Report. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Occupied Palestinian Territory 3 August 2014. [http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha\\_opt\\_sitrep\\_04\\_08\\_2014.pdf](http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_sitrep_04_08_2014.pdf) (Diakses 12 September 2016)
- Gaza Emergency Situation Report. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Occupied Palestinian Territory 10 October 2014. [https://www.ochaopt.org/documents/ocha\\_opt\\_sitrep\\_14\\_10\\_2014.pdf](https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_14_10_2014.pdf) (Diakses 12 September 2016)
- Global Research, Third day of Israeli Attacks Deepens Anger of Arab Masses, <http://www.globalresearch.ca/third-day-of-israeli-attacks-deepens-anger-of-arab-masses/11537> (diakses 3 September 2016)
- Government Public Officer, Public Law 112-74, <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ74/html/PLAW-112publ74.htm>
- Human Right Watch. 2015. *Israel: Security Forces Abuse Palestinian Children*. <https://www.hrw.org/news/2015/07/19/israel-security-forces-abuse-palestinian-children>. 15 September 2016.
- Kassis, Rifat Odeh. 2015. *Defense for Children International Palestine. Annual Reports 2014*. [https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci\\_report\\_2015\\_english\\_small.pdf?1435333791/](https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791/). 12 September 2016.
- Marsden. Chris. 2008. *Third Day of Israeli Attacks Deepens Anger of Arab Masses*. <http://www.globalresearch.ca/third-day-of-israeli-attacks-deepens-anger-of-arab-masses/11537>. 3 September 2016.
- OECD, African Economic Outlook, 2013 <https://www.oecd.org/countries/egypt/> (diakses pada 29 Mei 2017)
- Reuters, Israeli says has evidence 47 percent of Gaza dead were combatants <http://www.reuters.com/article/us-mideast-gaza-casualties-idUSKBN0G20HF20140802>



- State Information Service. 2017. *The Constitution*.  
<http://www.sis.gov.eg/section/28/2603?lang=en-us>. 22 Juni 2017.
- The Global Review, Menelisik Hubungan Mesir dan Israel Sepanjang Sejarah,  
[http://theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=5869&type=2](http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=5869&type=2) (Diakses 29 Mei 2017)
- US State Department, Congressional Budget Justification,  
<https://www.state.gov/documents/organization/252179.pdf> (Diakses pada 29 Mei 2017)
- Viva News, Usai Perang, Israel dan Palestina Sepakat Bangun Kembali Gaza.  
<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/539336-usai-perang-israel-dan-palestina-sepakat-bangun-kembali-gaza> (diakses 14 September 2016)

